

**ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN ANGGARAN
BELANJA DALAM MENILAI KINERJA KEUANGAN
PADA DISPERKIMTAN PROVINSI SUL-SEL**

SKRIPSI

**OLEH
HERIADI
105720553715**



**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2019

**ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN ANGGARAN
BELANJA DALAM MENILAI KINERJA KEUANGAN
PADA DISPERKIMTAN PROVINSI SUL-SEL**

SKRIPSI

Oleh

HERIADI
105720553715

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar

Sarjana ekonomi pada jurusan manajemen

Fakultas ekonomi dan bisnis

Universitas muhammadiyah makassar

PROGRAM STUDI MANAJEMEN

FAKULTAS EKONO0MI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2019

PERSEMBAHAN

Karya Ilmiah ini kupersembahkan

1. Kedua orang tuaku
2. Almamater
3. Sahabat-sahabat terbaikku





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN MANAJEMEN

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt.7 Tel. (0411) 866 972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul : Analisis Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Belanja Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan

Nama Mahasiswa : Heriadi

No. Stambuk : 105720553715

Program Studi : Manajemen

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diteliti, diperiksa dan diajukan di depan panitia penguji skripsi Sastra Satu S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar pada hari jum'at 30 agustus 2019

Makassar, Agustus 2019

Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Abdul Muttalib, SE.,MM
NIDN: 0901125901

Muhammad Nur Abdi,SE.MM
NIDN: 0907018605

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Ketua Program studi

Ismail Rasulong, SE., MM
NBM : 903078

Muh. Nur Rasyid, SE., MM
NBM : 1085 576



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN MANAJEMEN

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt.7 Tel. (0411) 866 972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas Nama Heriadi, Nim :105720553715, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0011/SK-Y/61201/091004/2019M, Tanggal 29 Dzulhijjah1440H/ 30 agustus 2019M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada program studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 29 Dzulhijjah1440H

30 Agustus 2019 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE., MM (.....)
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE., MM (.....)
(Dekan FakultasEkonomidanBisnis)
3. Sekretaris : Dr. AgusSalim HR, SE., MM (.....)
(WD I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji : 1 . Dr. Hj. Ruliaty, MM (.....)
2. Faidul Adziem, SE., M.Si (.....)
3. Linda Arisanti Razak, SE., M.Si, Ak, CA (.....)
4. Nurinaya, ST., MM (.....)



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN MANAJEMEN

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt.7 Tel. (0411) 866 972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Heriadi

Stambuk : 105720553715

Program Studi : Manajemen

Dengan Judul : Analisis Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Belanja dalam Menilai Kinerja Keuangan Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi selatan.

Dengan ini menyatakan bahwa :

Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 2019

Yang membuat Pernyataan,

Heriadi

Diketahui Oleh :

Dekan, Fakultas Ekonomi & Bisnis

Ketua, Program Studi

Ismail Rasulong, SE.,MM
NBM: 903078

Muh. NurRasyid, SE., MM
NBM: 1085576

ABSTRAK

Heriadi Tahun 2019 Analisis Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Belanja Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan. skripsi program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I Abdul Muttalib, dan Pembimbing II Muhammad Nur Abdi.

Penelitian ini bertujuan untuk menilai kinerja keuangan melalui Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Belanja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan. Jenis penelitian yang digunakan kuantitatif dengan pendekatan deskriptif, data yang diolah adalah anggaran dan pelaksanaan anggaran belanja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2015 sampai 2017. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian menggunakan pengukuran efektivitas pada anggaran dan pelaksanaan anggaran belanja 2015-2017. Berdasarkan hasil perhitungan tahun 2015 sebesar 96,74% dan tahun 2017 sebesar 95,68%, dilihat dari perhitungan tersebut kinerja keuangan Dinas perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan sudah efektif. Pada tahun 2016 sebesar 88,12%, kinerja keuangan Dinas perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan cukup efektif .

Kata Kunci : Efektivitas, Anggaran, Kinerja keuangan



ABSTRACT

Heriadi in 2019 Analysis of Effectiveness of Budgetary Implementation in Assessing Financial Performance at Housing Offices, Settlement and Land agency Province of South Sulawesi selatan. the thesis program of Management Studies, Faculty of Economics and Business, University of Muhammadiyah Makassar. Guided by Advisor I Abdul Muttalib, and Advisor II Muhammad Nur Abdi.

This study aims to assess financial performance through the Effectiveness of Budget Execution of the Housing and Settlement Areas province of South Sulawesi. The type of research used is quantitatively with descriptive approach, data processed is the budget and implementation of the budget for Housing Office, Settlement and Land services province of South Sulawesi Province 2015 to 2017 Analysis techniques used in research use measurement of the 2015-2017 budget. Based on the results calculations in 2015 for 96.74% and in 2017 amounting to 95.68%, judging from these calculations the financial performance of the Housing of the Settlement Areas Province of South Sulawesi has been effective. In 2016 amounting to 88.12%, the financial performance of the Housing Office of the Settlement and Land Areas of South Sulawesi Province was quite effective.

Keywords :Effectiveness, Budget, Financial Performance



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahnya yang tiada henti diberikan kepada hambanya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulis skripsi yang berjudul "Analisis Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Belanja Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan.

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis bapak Jumasse dan ibu Hasnawiyah yang senang tiasa memberikan harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus tanpa pamrih. Dan saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan didunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari beberapa pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tinginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada:

- 1) Bapak Dr. H. Abd Rahman Rahim, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
- 2) Bapak Ismail Rasullong, SE., MM, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
- 3) Bapak Muh. Nur Rasyid, SE., MM, selaku Ketua Program Studi Manajemen Universitas Muhammadiyah Makassar.
- 4) Bapak Abdul Muttalib, SE., MM, selaku pembimbing I yang senangtiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi selesai dengan baik.
- 5) Bapak Muhammad Nur Abdi, SE., MM, selaku pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
- 6) Segenap Staf dan Pegawai Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan.
- 7) Bapak/Ibu dan asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
- 8) Segenap staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
- 9) Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manajemen Angkatan 2015 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.
- 10) Terima kasih teruntuk semua kerabat manajemen 15 H yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran,

motivasi, dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan Skripsi ini.

Mudah-mudahan Skripsi yang sederhana ini dapat bermamfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi Fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Makassar, Juli 2019

Heriadi



DAFTAR ISI

SAMPUL
MOTTO DAN PERSEMBAHAN iii
HALAMAN PERSETUJUAN iv
HALAMAN PENGESAHAN..... v
SURAT PERNTAAN..... vi
ABSTRAK BAHASA INDONESIA vii
ABSTRACT viii
KATA PENGANTAR ix
DAFTAR ISI xii
DAFTAR TABEL xv
DAFTAR GAMBAR xvi
BAB I. PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Mamfaat Penelitian	4
BAB II. LANDASAN TEORI 6
A. Tinjauan Teori	6
1. Kinerja	6
a. Pengertian Kinerja.....	6
b. Kinerja Keuangan.....	6
c. Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan.....	7
2. Anggaran belanja	7

a. Pengertian Anggaran	7
b. Tujuan Anggaran	8
c. Mamfaat Anggaran.....	9
d. Pentingnya Anggaran Sektor Publik.....	10
e. Fungsi Anggaran.....	10
f. Karakteristik Anggaran.....	12
g. Kelemahan Anggaran	13
h. Faktor Pertimbangan Dalam Anggaran	14
i. Belanja.....	14
j. Konsep Belanja Pemerintah.....	15
3. Efektivitas	22
a. Pengertian Efektivitas	22
b. Pengukuran Efektivitas	23
B. Tinjauan empiris.....	24
C. Kerangka konsep	33
BAB III. METODE PENELITIAN.....	34
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	34
C. Defenisi Operasional dan Pengukuran	34
D. Populasi dan Sampel	35
E. Teknik Pengumpulan Data	35
F. Teknik Analisis	35
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	37
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	37
B. Penyajian Data.....	46
C. Analisis Dan Interpretasi.....	47

BAB V. PENUTUP 59
A. Kesimpulan 59
B. Saran 60

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN**



DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
Tabel 2.1	Kriteria Efektivitas	23
Tabel 2.2	Penelitian terdahulu	24
Tabel 3.1	Definisi Operasional Variabel Dan Pengukuran	34
Tabel 4.1	Anggaran Dan Realisasi Anggaran Belanja	46
Tabel 4.2	Anggaran Belanja Langsung Dan Realisasi	46
Tabel 4.3	Anggaran Belanja Tidak Langsung Dan Realisasi	47
Tabel 4.4	Hasil Perhitungan Belanja Langsung	50
Tabel 4.5	Hasil Perhitungan Belanja Tidak Langsung	53
Tabel 4.6	Hasil perhitungan Tingkat Efektivitas Anggaran Belanja	56
Tabel 4.7	Hasil Perhitungan Tingkat Efektivitas Anggaran Belanja Laangsung, tidak langsung, dan belanja keseluruhan	57



DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
Gambar 2.1	Kerangka Konsep	33
Gambar 4.1	Struktur Organisasi	40



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam melaksanakan kegiatan berupa pelayanan kepada masyarakat, suatu daerah tidak dapat menjalankannya tanpa adanya anggaran. Hal ini dikarenakan anggaran merupakan dasar agar pemerintah mampu beroperasi. Pemendagri No 56 Tahun 2007 mendefinisikan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka anggaran pendapatan dan belanja daerah. Salah satunya laporan realisasi anggaran yang merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu perusahaan atau instansi, dimana fungsinya untuk mengetahui keadaan keuangan suatu perusahaan atau instansi.

Anggaran adalah dokumen yang berisi estimasi kinerja, berupa penerimaan dan pengeluaran, yang disajikan dalam ukuran moneter yang akan dicapai pada periode waktu tertentu dan menyertakan data masa lalu sebagai bentuk pengendalian dan penilaian kerja. Tujuan adanya anggaran sektor publik yaitu untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat (Halim dan Kusufi, 2014). Beberapa alasan mengapa anggaran sektor publik menjadi penting antara lain: (1) sebagai alat pemerintah untuk mengarahkan pembangunan, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, (2) adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tidak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang ada terbatas, dan (3) meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap rakyat

dalam hal anggaran yang berperan sebagai instrumen akuntabilitas publik. pemerintah menerapkan prinsip *good governance* khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah karena keuangan daerah berdampak secara langsung pada perubahan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Setiap lembaga pemerintahan wajib membuat anggaran agar penggunaan dana menjadi efisien dan efektif.

Anggaran publik merupakan alat perencanaan sekaligus alat pengendalian. Anggaran sebagai alat perencanaan mengindikasikan target yang harus dicapai oleh pemerintah sedangkan anggaran sebagai alat pengendalian alokasi sumber dana publik yang disetujui legeslatif untuk dibelanjakan. Anggaran pemerintah terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter yang menggunakan dana milik masyarakat. Melalui data rekening belanja yang terdapat dalam anggaran belanja lembaga/organisasi pemerintah, akan dilihat apakah anggaran yang telah dibuat dapat berperan sebagai pengendali terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintah.

Laporan Realisasi Anggaran bagian yang sangat penting dalam suatu perusahaan atau instansi, dimana fungsinya untuk mengetahui keadaan keuangan suatu perusahaan atau instansi. Laporan realisasi anggaran merupakan salah satu komponen dalam laporan keuangan pemerintah yang menyajikan informasi tentang realisasi anggaran dalam suatu periode tertentu. Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah yang telah ditetapkan melalui PERDA setelah sebelumnya diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir, laporan realisasi ini merupakan salah satu alat ukur untuk melihat implementasi dari kebijakan pelaksanaan pengelolaan keuangan suatu daerah dalam upaya

mewujudkan pelayanan publik yang optimal serta upaya dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah.

Permasalahan daya serap anggaran setiap tahunnya menjadi masalah rutin setiap tahunnya. Penyerapan dana tidak efektif tercermin dari dalam sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA), jumlah SILPA bukan semata-mata efisiensi pengelolaan belanja daerah tetapi lebih menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah belum efektif karena didalamnya, ada program atau kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan pada tahun anggaran yang bersangkutan.

Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai sasaran atau tujuan. Pelaksanaan anggaran memberikan implikasi bagi pemerintah untuk melakukan efisiensi dan efektivitas.

Efektivitas anggaran belanja merupakan salah satu prinsip dalam penyelenggaraan suatu organisasi, untuk dapat mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi. Tolak ukur dalam anggaran belanja suatu organisasi baik organisasi swasta maupun organisasi sektor publik. Meliputi penilaian ekonomis, efektivitas.

Mengingat pentingnya analisis terhadap penilaian kinerja sebagai alat bantu serta sumber informasi dalam menilai kinerja pelaksanaan anggaran belanja dalam menilai kinerja keuangan serta prestasi suatu organisasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Dari latar belakang masalah diatas penulis menyusun skripsi dengan judul:

“Analisis Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Belanja Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah efektivitas pelaksanaan anggaran belanja, kinerja keuangan 2015-2017 pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan?.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan anggaran belanja, kinerja keuangan 2015-2017 pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan mamfaat kepada pihak-pihak sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan efektivitas pelaksanaan anggaran belanja pada pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Bagi Instansi

Sebagai gambaran dan masukan yang positif bagi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan untuk dalam pelaksanaan anggaran belanja agar berjalan dengan efektif dan terealisasi sesuai apa yang sudah dianggarkan.

3. Bagi Akademisi

Bagi mereka yang ingin meneliti maka hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian dan perbandingan dalam mendapatkan hasil yang lebih baik.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Kinerja keuangan

a. Pengertian Kinerja

Mulyadi (2015:63) kinerja adalah hasil kerja yang telah dicapai oleh pekerja/karyawan secara kualitas dan kuantitas yang sesuai dengan tugas dan tanggungjawab.

Wibowo (2014:229) Menjelaskan bahwa pengukuran terhadap kinerja perlu dilakukan untuk mengetahui apakah selama pelaksanaan kinerja terdapat deviasi dari rencana yang telah ditentukan, atau apakah kinerja dapat dilakukan sesuai jadwal waktu yang ditentukan, atau apakah hasil kinerja telah tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

Mangkunegara (2013:67) hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tanggung jawab sesuai yang diberikan kepadanya.

Jadi berdasarkan teori-teori diatas kinerja adalah hasil kerja yang dicapai sesuai dengan tanggung jawab dengan hasil yang diharapkan.

b. Kinerja keuangan

Rudianto (2013:189). Kinerja keuangan adalah hasil atau prestasi yang telah dicapai oleh manajemen perusahaan dalam menjalankan fungsinya mengelola aset perusahaan secara efektif selama periode tertentu.

Hery (2015) Kinerja keuangan merupakan suatu usaha formal untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas perusahaan dalam menghasilkan

laba dan posisi kas tertentu. Dengan pengukuran kinerja keuangan, dapat dilihat prospek pertumbuhan dan perkembangan keuangan perusahaan.

Berdasarkan definisi keuangan diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan adalah gambaran kondisi keuangan pada periode tertentu di ukur dengan beberapa indikator.

c. Tujuan pengukuran kinerja keuangan

Menurut Jumingan (2014: 239) berkaitan dengan pengukuran Kinerja Keuangan mengandung beberapa tujuan:

- 1) Mengetahui keberhasilan pengelolaan keuangan perusahaan terutama kondisi likuiditas, kecukupan modal dan profitabilitas yang dicapai dalam tahun berjalan maupun tahun sebelumnya.
- 2) Mengetahui kemampuan perusahaan dalam mendayagunakan semua aset yang dimiliki dalam menghasilkan profit secara efisien.

2. Anggaran Belanja

a. Pengertian Anggaran

Menurut Munandar (2014:1) Anggaran yaitu suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit kesatuan monetary yang berlaku untuk jangka waktu periode tertentu yang akan datang.

Sri Rahayu dan Andry Arifian Rachman (2013:4) Anggaran merupakan alat perencanaan dan pengendalian.

Gunawan Adisaputro (2017:02) mendefinisikan Budget adalah suatu pendekatan yang formal dan sistematis dari pelaksanaan tanggung jawab manajemen di dalam perencanaan koordinasi dan pengawasan.

Mahsun (2013:145) menyatakan bahwa anggaran adalah perencanaan keuangan untuk masa depan yang pada umumnya mencakup jangka satu tahun dan dinyatakan dalam satuan moneter. Anggaran merupakan perencanaan jangka pendek organisasi yang menerjemahkan berbagai program kedalam rencana keuangan tahunan yang lebih kongkret.

Halim dan Kusufi (2014:48) anggaran adalah dokumen yang berisi estimasi kinerja, baik berupa penerimaan dan pengeluaran, yang disajikan dalam ukuran moneter yang akan dicapai pada waktu tertentu menyertakan data masa lalu sebagai bentuk pengendalian kinerja.

Indra (2016: 191) menjelaskan bahwa anggaran merupakan rencana operasional keuangan yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayai dalam periode waktu tertentu.

Nafarin (2013:11) Anggaran merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan dalam suatu uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang/jasa.

Jadi berdasarkan teori-teori diatas anggaran adalah suatu rencana kegiatan dalam bentuk finansial yang meliputi pengeluaran yang diperkirakan dalam suatu periode waktu untuk sebuah tujuan

b. Tujuan Anggaran

Berikut adalah tujuan lainnya terkait dengan penyusunan anggaran menurut Sasongko dan Parulian (2013:3)

1) Perencanaan

Anggaran memberikan arahan bagi penyusunan tujuan dan kebijakan perusahaan.

2) Koordinasi

Anggaran dapat mempermudah koordinasi antara bagian-bagian didalam perusahaan.

3) Motivasi

Anggaran membuat manajemen dapat menetapkan target-target tertentu yang harus dicapai oleh perusahaan.

4) Pengendalian

Keberadaan anggaran di perusahaan memungkinkan manajemen untuk melakukan fungsi pengendalian atas aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan dalam perusahaan.

Tujuan penyusunan anggaran menurut Nafarin (2013:19) adalah sebagai berikut:

- 1) Digunakan sebagai landasan yuridis formal dalam memilih sumber dan investasi dana.
- 2) Membatasi pembatasan jumlah dana yang dicari dan digunakan.
- 3) Merasionalkan sumber dan investasi dana agar dapat mencapai hasil yang maksimal.
- 4) Menyempurnakan rencana yang telah disusun karena dengan anggaran menjadi lebih jelas dan nyata terlihat.

c. Manfaat anggaran

Menurut Nafarin (2013:19) manfaat adalah anggaran sebagai berikut:

- 1) Semua kegiatan dapat mengarah pada pencapaian tujuan bersama.
- 2) Dapat digunakan sebagai alat menilai kelebihan dan kekurangan pegawai.
- 3) Dapat memotivasi pegawai.
- 4) Menimbulkan rasa tanggung jawab tertentu pada pegawai.
- 5) Menghindari pemborosan dan pembayaran yang kurang perlu.
- 6) Sumber daya. Seperti tenaga kerja, peralatan, dan dana dapat dimanfaatkan seefisien mungkin.

d. Pentingnya anggaran sektor publik

Halim dan Kusufi (2014) beberapa alasan mengapa anggaran sektor publik menjadi penting antara lain :

- 1) Sebagai alat pemerintah untuk mengarahkan pembangunan, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- 2) Adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tidak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang ada terbatas.
- 3) Meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap rakyat dalam hal anggaran yang berperan sebagai instrumen akuntabilitas publik.

e. Fungsi anggaran

Sasongko dan Parulin (2015:3) fungsi anggaran sebagai berikut:

1) Perencanaan

Anggaran memberikan arahan bagi penyusunan tujuan dan kebijakan perusahaan.

2) Koordinasi

Anggaran dapat mempermudah koordinasi antar bagian-bagian dalam perusahaan.

3) Pengendalian

Keberadaan anggaran di perusahaan memungkinkan manajemen untuk melakukan fungsi pengendalian atas aktivitas yang dilaksanakan di dalam perusahaan.

4) Motivasi

Anggaran membuat manajemen dapat menetapkan target tertentu yang harus dicapai.

Menurut Nafarin (2013:5), seluruh fungsi anggaran dalam suatu organisasi dapat dikelompokkan ke dalam empat fungsi pokok, yaitu fungsi:

1) *Planning* (perencanaan)

Didalam fungsi ini ditetapkan tujuan jangka panjang, tujuan jangka pendek, sasaran yang dicapai, strategi yang akan digunakan dan sebagainya. Didalam fungsi ini berkaitan dengan segala sesuatu yang ingin dihasilkan dan dicapai perusahaan di masa mendatang. Termasuk di dalamnya menetapkan produk yang akan dihasilkan, bagaimana menghasilkannya, sumber daya yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk tersebut, bagaimana memasarkan produk tersebut dan sebagainya.

2) *Organizing* (Pengorganisasian)

Setelah segala sesuatu yang ingin dihasilkan dan dicapai perusahaan di masa depan telah ditetapkan, maka perusahaan harus mencari sumber

daya yang dibutuhkan untuk merealisasikan rencana yang telah tersebut. Dimulai dari upaya memperoleh bahan baku, mencari mesin yang dibutuhkan untuk mengelola bahan baku tersebut, bangunan yang dibutuhkan untuk mengolah produk tersebut, mencari tenaga kerja dengan kualifikasi yang dibutuhkan, mencari modal yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk yang direncanakan dan sebagainya.

3) *Actuating* (Menggerakkan)

Setelah sumber daya yang dibutuhkan diperoleh, maka tugas manajemen selanjutnya adalah mengarahkan dan mengelola setiap sumber daya yang telah dimiliki perusahaan tersebut agar dapat digunakan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Setiap sumber daya yang ada harus dikerahkan, dikoordinasikan satu dengan lainnya agar dapat bekerja optimal untuk mencapai tujuan perusahaan.

4) *Controlling* (Pengendalian)

Setelah sumber daya yang dibutuhkan perusahaan diperoleh dan diarahkan untuk bekerja sesuai dengan fungsinya masing-masing, maka langkah berikutnya adalah memastikan bahwa setiap sumber daya tersebut telah bekerja sesuai dengan rencana yang telah dibuat perusahaan untuk menjamin bahwa tujuan perusahaan secara umum dapat dicapai.

f. karakteristik anggaran

Mulyadi (2013:490) mengatakan bahwa karakteristik dari anggaran sebagai berikut :

- 1) Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan selain keuangan.

- 2) Anggaran umumnya mencakup jangka waktu satu tahun.
- 3) Anggaran berisi komitmen atas kesanggupan manajemen yang berarti bahwa para manajer setuju untuk menerima tanggung jawab untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam anggaran.
- 4) Usulan anggaran yang telah dan disetujui oleh pihak yang berwenang lebih tinggi dari penyusunan anggaran.
- 5) Sekali disetujui, anggaran hanya dapat dirubah dibawah kondisi tertentu.
- 6) Secara berkala kinerja keuangan sesungguhnya dibandingkan dengan anggaran dan selisihnya di analisis dan dijelaskan.

g. Kelemahan anggaran

Menurut Nafarin (2013:20), menjelaskan kelemahan anggaran yaitu sebagai berikut:

- 1) Anggaran dibuat berdasarkan taksiran dan anggapan sehingga mengandung unsur ketidakpastian.
- 2) Menyusun anggaran yang cermat memerlukan waktu, uang, dan tenaga yang tidak sedikit sehingga tidak semua perusahaan mampu menyusun anggaran secara lengkap (komprehensif) dan akurat.
- 3) Bagi pihak yang merasa dipaksa untuk melaksanakan anggaran dapat mengakibatkan mereka menggerutu dan menentang sehingga anggaran tidak akan efektif.

Menurut Munandar (2014:13) menjelaskan bahwa anggaran memiliki beberapa kelemahan, antara lain :

- 1) Anggaran disusun berdasarkan taksiran-taksiran (*forecasting*).
Betapapun cermatnyataksiran tersebut dibuat, namun amatlah sulit

untuk mendapatkan taksiran yang benar-benar akurat sama sekali tidak berbeda dengan kenyataannya nanti.

2) Taksiran-taksiran dalam anggaran disusun dengan mempertimbangkan berbagai data, informasi dan faktor-faktor, baik yang *controllable* maupun *uncontrollable*. Dengan demikian, jika nantinya perubahan-perubahan terhadap data, informasi serta faktor-faktor tersebut, akan berubah pula ketetapan taksiran-taksiran yang telah disusun tersebut.

3) Berhasil atau tidaknya pelaksanaan realisasi anggaran sangat tergantung pada manusia pelaksananya. Anggaran yang baik tidak akan bisa direalisasikan bilamana pelaksananya tidak mempunyai keterampilan serta kecakupan yang memadai.

h. faktor dan pertimbangan dalam anggaran

Nafarin (2013:11) menegaskan bahwa faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan anggaran adalah sebagai berikut :

- 1) pengetahuan tentang tujuan dan kebijakan umum perusahaan.
- 2) Data waktu lalu.
- 3) Kemungkinan perkembangan kondisi ekonomi.
- 4) Pengetahuan tentang taktik, strategi pesaing, dan gerak-gerik pesaing.
- 5) Penelitian untuk pengembangan perusahaan.

i. Belanja

Peraturan pemerintah No. 58 Tahun 2005, belanja adalah semua pengeluaran rutin dari rekening kas umum yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran.

j. Konsep belanja pemerintah

Standar Akuntansi Pemerintahan SAP menyatakan belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Definisi lain Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan pemendagri N0. 59 Tahun 2007 dan adanya perubahan kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua, belanja dikelompokkan menjadi:

1) Belanja Langsung

Belanja Langsung adalah belanja yang di anggarkan terkait secara langsung dengan program dan kegiatan. Belanja Langsung terdiri dari belanja:

- a) Belanja pegawai
- b) Belanja barang dan jasa
- c) Belanja modal

2) Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:

- a) Belanja pegawai
- b) Belanja bunga
- c) Belanja subsidi

3) Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang mamafatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset

atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin biaya operasi dan pemeliharaan.

peraturan menteri keuangan nomor 101/PMK.02/2011 tentang klasifikasi anggaran :

1) Belanja pegawai

Kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan pensiunan serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintah baik yang bertugas di dalam maupun diluar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah.

2) Belanja barang

Pengeluaran untuk pembelian barang atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang atau jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat diluar kriteria belanja bantuan sosial serta pengadaan belanja perjalanan.

Belanja barang dipergunakan untuk:

- a) Belanja barang operasional merupakan pembelian barang atau jasa yang habis pakai yang dipergunakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar suatu satuan kerja dan umumnya pelayanan yang bersifat internal jenis pengeluaran terdiri dari (belanja keperluan perkantoran, belanja pengadaan bahan makanan, belanja penambah daya tahan tubuh, belanja bahan, belanja pengiriman surat dinas, belanja langganan daya dan jasa/ listrik, telepon, dan air termasuk

atas rumah dinas yang tidak berpenghuni, belanja biaya pemeliharaan gedung dan bangunan, belanja biaya pemeliharaan peralatan dan mesin, belanja sewa gedung operasional sehari-hari satuan kerja, dan belanja barang operasional lainnya yang diperlakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar lainnya).

- b) Belanja barang non operasional merupakan pembelian barang atau jasa yang habis pakai dikaitkan dengan strategi pencapaian target kinerja suatu satuan kerja dan umumnya pelayanan yang bersifat eksternal. Jenis pengeluaran terdiri dari (honor yang terkait dengan output kegiatan, belanja operasional terkait dengan penyelenggaraan administrasi kegiatan diluar kantor, antara lain biaya paket, rapat/pertemuan, ATK, uang saku, uang transportasi lokal, biaya sewa peralatan yang mendukung penyelenggaraan kegiatan, belanja jasa konsultan, belanja sewa yang dikaitkan dengan strategi pencapaian target kinerja, belanja jasa, belanja perjalanan, belanja barang penunjang kegiatan dekonsentrasi, belanja barang dan penunjang tugas pembantuan, belanja barang fisik lain tugas pembantuan)
- c) Belanja barang badan layanan umum (BLU) merupakan pengeluaran anggaran belanja operasional BLU termasuk pembayaran gaji tunjangan pegawai BLU
- d) Belanja barang untuk masyarakat atau entitas lain merupakan pengeluaran anggaran belanja negara untuk pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat atau entitas lain

yang tujuan kegiatannya tidak termasuk dalam kriteria kegiatan bantuan sosial.

3) Belanja modal

Kriteria kapitalisasi dalam pengadaan atau pemeliharaan barang atau aset merupakan suatu tahap validasi untuk penetapan belanja modal atau bukan dan merupakan syarat wajib, dalam penetapan kapitalisasi atas pengadaan barang atau aset:

- a) Pengeluaran anggaran belanja tersebut mengakibatkan bertambahnya aset dan atau bertambahnya masa mamfaat atau umur ekonomis aset.
- b) Pengeluaran anggaran belanja tersebut mengakibatkan bertambahnya kapasitas peningkatan standar kinerja atau volume aset.
- c) Memenuhi nilai minimm kapitalisasi dengan rincian untuk pengadaan peralatan dan mesin batas minimal harga pasar per unit barang adalag 300.000 untuk pembangunan atau pemeliharaan gedung dan bangunan per paket pekerjaan adalah sebesar 10.000.000.
- d) Pengadaan barang tersebut tidak dimaksudkan untuk siserahkan atau di pasarkan kepada masyarakat atau entitas lain diluar pemerintah.

Belanja modal dipergunakan untuk antara lain:

- a) Belanja modal tanah seluruh pengeluaran untuk pengadaan, pembelian, pembebasan, penyelesaian, balik nama, pengosongan, penimbunan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah, serta pengeluaran lain yang bersifat administratif

sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah pada saat pembebasan atau ganti rugi sampai tanah tersebut siap dipakai.

- b) Belanja modal peralatan dan mesin pengeluaran untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin siap digunakan.
- c) Belanja modal gedung dan bangunan pengeluaran untuk memperoleh gedung dan bangunan secara kontraktual sampai dengan gedung dan bangunan siap digunakan meliputi biaya pembelian atau biaya konstruksi biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.
- d) Belanja modal jalan irigasi dan jaringan pengeluaran untuk memperoleh jalan dan jembatan irigasi dan jaringan sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya lain yang dikeluarkan sampai siap pakai.
- e) Belanja modal badan layanan umum (BLU) pengeluaran untuk pengadaan atau perolehan atau pembelian aset yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan operasional BLU.

4) Belanja bunga utang

Pembayaran kewajiban atas penggunaan pokok utang baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri yang dihitung berdasarkan ketentuan dan persyaratan dari utang sudah ada dan perkiraan utang baru, termasuk untuk biaya terkait dengan pengelolaan uang.

5) Belanja subsidi

Alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan atau lembaga untuk memproduksi menjual mengeksport atau mengimpor barang atau jasa yang memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau masyarakat. Belanja subsidi diberikan oleh menteri keuangan selaku bendahara umum negara, belanja subsidi terdiri dari :

(1) Energi

Alokasi Anggaran yang diberikan kepada perusahaan atau lembaga yang menyediakan dan mendistribusikan bahan bakar minyak (BBM) jenis tertentu, (LPG) konsumsi rumah tangga dan usaha mikro sehingga harga jual terjangkau oleh masyarakat yang membutuhkan.

(2) Non energi

Alokasi Anggaran yang diberikan kepada perusahaan atau lembaga yang menyediakan dan mendistribusikan barang publik yang bersifat non energi sehingga harga jual terjangkau oleh masyarakat yang membutuhkan.

6) Belanja hibah

Merupakan belanja pemerintah pusat dalam bentuk transfer, uang/barang kepada pemerintah negara lain, organisasi internasional BUMN/D, dan pemerintah daerah yang bersifat sukarela, tidak wajib, tidak mengikat, dan tidak perlu dibayar kembali serta tidak terus menerus dan dilakukan dengan naskah perjanjian antara pemberi hibah dan penerima hibah dengan pengalihan hak dalam bentuk uang, barang dan jasa. Termasuk

dalam belanja hibah adalah pinjaman atau hibah luar negeri yang diterushibahkan ke daerah.

7) Belanja bantuan sosial

Transfer uang atau barang yang diberikan oleh pemerintah pusat/daerah kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat atau lembaga kemasyarakatan termasuk didalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Kriteria belanja bantuan sosial ditujukan antara lain belanja rehabilitasi sosial, belanja pemberdayaan sosial, belanja perlindungan sosial, belanja penanggulangan bencana, belanja jaminan sosial, belanja penanggulangan kemiskinan.

8) Belanja lain-lain

Pengeluaran negara untuk pembayaran atas kewajiban pemerintah yang tidak masuk dalam kategori belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja bunga utang, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial serta bersifat mendesak dan tidak dapat diprediksi sebelumnya.

Belanja lain-lain di pergunakan untuk belanja lain-lain dana cdangan dan risiko fiskal, lembaga non kementrian, tanggap darurat.

9) Trasfer kedaerah

Semua pengeluaran negara yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Rincian transfer ke daerah antara lain transfer dana bagi hasil, transfer dana alokasi khusus, transfer dana alokasi umum, transfer dana penyesuaian dan transfer otonomi khusus.

3. Efektivitas

a. Pengertian Efektivitas

Mahmudi (2015:86) menjelaskan bahwa efektivitas terkait dengan hubungan antara output dengan tujuan semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan efektivitas berfokus pada outcome (hasil). Suatu organisasi program atau kegiatan dinilai efektif apabila output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan.

Mardiasmo (2014:132) pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). efektivitas adalah hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan.

Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah ukuran berhasil atau tidaknya organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

b. pengukuran efektivitas

Berikut format untuk mengukur tingkat efektivitas anggaran belanja:

$$Efektivitas = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

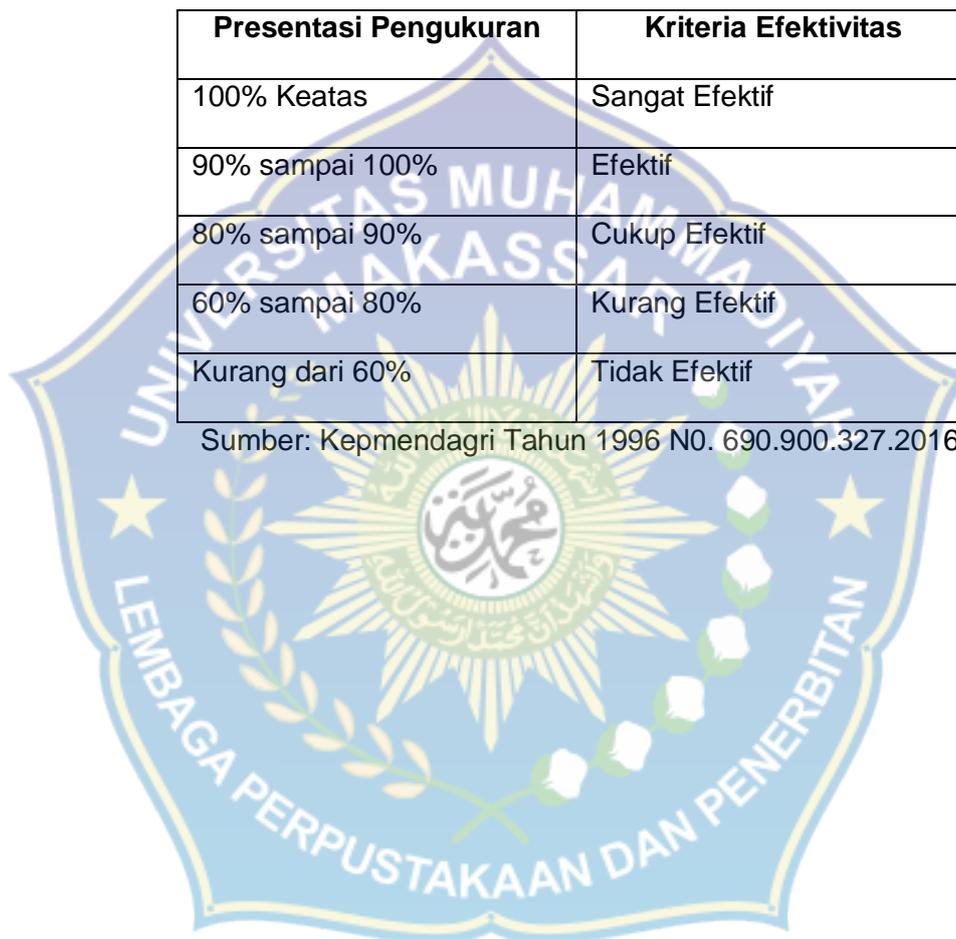
Keputusan menteri dalam negeri 690, 900-327 tahun 1996, kriteria tingkat efektifitas anggaran belanja dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1

Kriteria Efektifitas

Presentasi Pengukuran	Kriteria Efektivitas
100% Keatas	Sangat Efektif
90% sampai 100%	Efektif
80% sampai 90%	Cukup Efektif
60% sampai 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber: Kepmendagri Tahun 1996 NO. 690.900.327.2016



B. Tinjauan Empiris

Tabel 2.2
Penelitian terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Imanuel Pangkey Dan Sherly Pinatik 2015	analisis efektivitas dan efesiensi anggaran belanja pada Dinas Kebudayaan Dan Parawisata Provinsi Sulawesi Utara.	Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa periode anggaran belanja 2010-2014 untuk efektivitas penggunaan anggaran belanja langsung keseluruhannya tidak efektif karena dari setiap program dan anggaran yang direncanakan, banyak program yang terealisasi tapi tidak sesuai anggaran yang direncanakan dan ada juga program yang tidak terealisasi. Sementara untuk tingkat efesiensi anggaran belanja tidak langsung dari periode 2010-2014 tidak efesien, karena keseluruhan dan anggaran belanja tidak langsung tidak dapat mencapai atau bahkan melampaui anggaran yang direncanakan. Dapat diketahui bahwa anggaran belanja sangat berpengaruh terhadap efektivitas dan efesiensi sehingga setiap tahun hasilnya akan berbeda.

<p>Astria Nur Jannah Dien Dkk, 2015</p>	<p>analisis laporan realisasi anggaran untuk menilai kinerja keuangan pada kantor dinas pendapatan daerah kota bitung</p>	<p>dari hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) tingkat dan kriteria efektivitas penerimaan pendapatan asli daerah Di Dinas Pendapatan Kota Bitung tahun anggaran 2009-2013 sangat efektif dari tahun ke tahun, 2) dilihat dari hasil perhitungan rasio efektivitas menunjukkan bahwa Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung mampu memobilisasi penerimaan pendapatan asli daerah sesuai dengan yang ditargetkan dengan tingkat efektivitas di atas 100%. 3) tingkat dan kriteria efisiensi anggaran belanja Dinas Pendapatan Kota Bitung tahun anggaran 2009-2013 secara keseluruhan kurang efisien dari tahun ke tahun, 3) dilihat dari hasil perhitungan rasio efisiensi menunjukkan bahwa dinas kota bitung kurang mengifisienkan penggunaan anggaran belanja sesuai yang ditargetkan dengan tingkat efisiensi yang hampir mendekati 100%.</p>
<p>Harry Saputra</p>	<p>Analisis kinerja</p>	<p>dari hasil penelitian menunjukkan</p>

<p>Liando Dkk, 2014</p>	<p>keuangan pemerintah kabupaten kepulauan sanghie menggunakan <i>Metode Value For Money</i></p>	<p>bahwa 1) kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam mengiptimalisasi anggaran harus lebih hemat dan tepat sasaran, 2) kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan sangihe harus ditingkatkan lagi sehingga masyarakat merasakan hasil otonomi terutama nimal anggaran yang lebih berpihak pada kepentingan masyarakat, 3) kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sengihe dapat diperbaiki dengan upaya adanya peningkatan secara berkesinambungan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat.</p>
<p>Sitti Basyariah 2017</p>	<p>Analisis efektivitas dan efesiensi pelaksanaan anggran belanja pada badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa (BPMPD) Daerah</p>	<p>dari hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Tingkat dan kriteria Efektivitas untuk Pelaksanaan Anggaran pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011-2015 rata-rata secara keseluruhan terlaksana secara Efektif, artinya kegiatan yang diprogramkan</p>

	Provinsi Sulawesi Tengah	<p>sudah trealisasi dan sesuai dengan yang diharapkan. Namun ada beberapa program pada tahun 2013 dan 2015 kategorinya cukup efektif karena realisasi anggaran belanja masih di bawah 90%. 2) Rasio Efisiensi yang dihasilkan selama lima tahun menunjukkan hasil yang bervariasi, rata-rata pengelolaan anggaran belanja menunjukkan kategori cukup efisien, bahkan tahun 2011 dan 2015 hasilnya efisien, ini menunjukkan bahwa BPMPD Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dapat melaksanakan seluruh program kegiatan sesuai dengan rencana strategis. Adanya pengurangan Anggaran tidak mempengaruhi pelaksanaan program pemberdayaan kepada masyarakat. 3) Kendala yang dihadapi dalam mewujudkan pelaksanaan program ada beberapa yang mendasar, antara lain dukungan anggaran yang terbatas sehingga tidak semua kegiatan yang tertuang dalam</p>
--	--------------------------	--

		program dapat dilaksanakan; masih rendahnya kemampuan sumber daya manusia diperdesaan, sehingga sasaran
Welio Wonda 2016	Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah dalam masa otonomi daerah kabutaen nabire provinsi papua	dengan hasil penelitian 1)Rasio kemandirian keuangan daerah kabupaten Nabire mengalami penurunan dan kenaikan. Rasio kemandirian keuangan daerah kabupaten nabire 1 (satu) sampai dengan 6 % selama tahun anggaran 2011-2013. Dalam hal ini kemampuan daerah membiayai sendiri kegiatan pemerintah pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dikatakan cukup baik dengan kata lain bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah ditijukan cukup baik. 2) Rasio Efektivitas, pemungkutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dikabupaten Nabire tahun anggaran 2011-2013 baik karena presentase yang diperoleh dari rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Nabire melebihi satu atau 100%. Jadi kinerja

		<p>keuangan pemerintah daerah kabupaten Nabire dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah adalah baik. 3) Rasio Efisiensi dalam mengeluarkan biaya untuk memperoleh pendapatan yang dibandingkan dengan realisasi pendapatan yang diterima di kabupaten Nabire tahun anggaran 2011 sampai dengan 2013 rasio efisiensi pendapatan asli daerah (PAD) lebih besar di bandingkan dengan realisasi yang di peroleh daerah (Realisasi Penerimaan Daerah) sehingga presentasi yang di peroleh dari rasio efisiensi melebihi 100 % sedangkan kinerja pemerintah daerah dikatakan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari satu atau di bawah dari 100%.</p>
Rukayah Dkk 2017	analisis laporan realisasi anggran	Dengan hasil penelitian Efektivitas Badan Perijinan Terpadu dan

	<p>dengan menggunakan rasio efektivitas dan rasio efisiensi pada kantor badan perijinan terpadu dan penanaman modal kabupaten serang</p>	<p>Penanaman Modal Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2014 sampai dengan Tahun 2016 dilihat dari perhitungan rata-rata Rasio Efektivitasnya diperoleh sebesar 102% termasuk dalam Kriteria Sangat Efektif. Hal ini berarti Pemerintah Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang dikatakan berhasil Merealisasikan Pendapatan dengan Anggaran Pendapatannya. Efisiensi Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2014 sampai dengan Tahun 2016. Dilihat dari perhitungan rata-rata Rasio Efisiensinya diperoleh sebesar 92% termasuk dalam Kriteria Kurang Efisien. Hal ini berarti Pemerintah Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang dapat dikatakan Kurang berhasil dalam Merealisasikan Belanja dengan Anggaran Belanjanya.</p>
<p>Indra Mahardika</p>	<p>mengenai proses penyusunan</p>	<p>hasil penelitiannya adalah proses penyusunan anggaran pada dinas</p>

Putra 2017	anggaran pada dinas pendidikan pemuda dan olahraga kabupaten sleman yogyakarta,	pendidikan pemuda dan olahraga kabupaten sleman telah sesuai dengan peraturan pemerintah yaitu peraturan menteri keuangan No.92 pmk.05 dan lemahnya proses evaluasi dan monitoring program sehingga terjadi kendala pada proses keterlambatan dalam perencanaan dana.
Ramlah Basri 2013	analisis penyusunan anggaran dan laporan realisasi anggaran pada BPM-PD provinsi sulawesi utara	dengan hasil penelitian adalah dalam pembahasan KUA/PPAS dan TAPD tidak diikuti oleh semua bidang yang ada di BPM-PD provinsi sulawesi utara. Proses penyusunan anggaran BPM-PD provinsi sulawesi utara telah berdasarkan peraturan menteri dalam negeri No.13 Tahun 2006 dan No.22 Tahun 2011. Realisasi anggaran BPM-PD provinsi sulawesi utara tahun 2012 sebesar 95,30%.
Anastasia Friska Palilingan Dkk, 2015	mengenai analisis kinerja belanja dalam laporan realisasi anggaran pada dinas	Hasilnya penelitiannya adalah kinerja pendapatan pemerintah kota manado dilihat dari analisis pertumbuhan pendapatan kota manado 2009-2013 cukup baik. Hal ini ditunjukkan rata-

	pendapatan kota manado.	rata pertumbuhan pendapatan dan PAD positif. Pertumbuhan PAD kota manado dari tahun 2009-2013 cenderung mengalami penurunan kinerja pemerintah kota manado dari analisis pembiayaan secara umum sudah baik terlihat dari siapa yang bersaldo positif yang berarti pemerintah kota manado sudah tepat dalam penyajian suatu rencana anggaran, kecuali tahun 2011.
Ardon Fridolin Honga dan Ventie Ilat 2014	Analisis realisasi anggaran pendapatan belanja daerah pemerintah kota bitung	Hasil penelitiannya adalah APBD pemerintah kota bitung terealisasi dengan baik karena anggaran tidak melebihi target yang dianggarkan. Pemahaman teknis tentang realisasi anggaran kinerja keuangan pemerintah yang baik yaitu, dengan menerapkan sistem akuntansi pemerintah. Realisasi anggaran pendapatan anggar belanja dan realisasi kinerja keuangan telah dilakukan dengan baik dalam laporan realisasi anggaran sesuai ketentuan yang berlaku.

C. Kerangka Konsep

Penelitian ini bertujuan untuk medeskripsikan hasil perhitungan dari rasio efektivitas pelaksanaan anggaran belanja pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan periode 2015-2017.

Dinas Perumahan Kawasan Perukiman Dan Pertanahan Provinsi
Sulawesi Selatan

Laporan Anggaran 2015-2017

Efektivitas Pelaksanaan Anggaran
Belanja

Kinerja Keuangan
Gambar 2.1

Gambar 2.1
Kerangka Konsep



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif. Alasan saya mengambil jenis penelitian ini karena pembahasan yang dilakukan bersifat mengetahui nilai variabel mandiri baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan variabel satu dengan yang lain.

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi dari penelitian ini adalah di Kantor Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan. Dan dalam melakukan penelitian ini waktu yang digunakan untuk penelitian 2 bulan, mulai bulan April-Juni 2019

C. Definisi Operasional Dan Pengukuran

Tabel 3.1

Definisi Operasional Variabel Dan Pengukuran

Variabel	Defenisi	Indikator
Efektivitas anggaran	Efektivitas berkaitan dengan pengukuran seberapa tepat dalam mencapai target, yaitu dengan membandingkan hasil yang ditargetkan dengan	$Efektivitas = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$ <p>Kriteria efektivitas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 100% ke atas sangat efektif 2. 90% sampai 100% efektif 3. 80% sampai 90% cukup efektif 4. 60% sampai 80% kurang efektif 5. Kurang dari 60% tidak efektif

	realisasinya	
Kinerja keuangan	Gambaran kondisi keuangan pada periode tertentu	Menggunakan pengukuran efektivitas pelaksanaan anggaran belanja

D. Populasi Dan Sampel

Populasi anggaran belanja periode tahun 2015-2017.

Sampel dalam penelitian ini adalah anggaran belanja periode tahun 2015-2017

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam memperoleh bahan penyusunan skripsi ini dilakukan dengan cara:

1. Penelitian Pustaka (*Literature Research*)

pengumpulan data ini diperoleh dengan cara membaca, mengkaji, dan menelaah berbagai buku yang ada kaitanya dengan masalah yang dibahas.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Pengumpulan data di lapangan menggunakan metode dokumentasi dan wawancara. Dokumentasi yaitu dengan cara mencatat anggaran belanja.

Wawancara yaitu dengan cara berkomunikasi secara langsung dengan pihak yang berwenang.

F. Teknik Analisis

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini dengan menyajikan angka, tabel dan uraian penjelasan pengukuran pelaksanaan anggaran belanja dengan menggunakan pengukuran efektivitas pada anggaran dan realisasi

belanja 2015-2017 pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan
Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan.

1. Pengukuran efektivitas

$$Efektivitas = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

2. Kriteria efektivitas

- a. 100% ke atas sangat efektif
- b. 90% sampai 100% efektif
- c. 80% sampai 90% cukup efektif
- d. 60% sampai 80% kurang efektif
- e. Kurang dari 60% tidak efektif



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1) Sejarah Singkat Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan

Dinas Pekerjaan Umum berdiri sejak zaman Belanda, dahulu bernama PW dan kini telah menjadi Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan ini adalah merupakan salah satu instansi dibawah naungan Departemen Pekerjaan Umum yang berkedudukan di Jakarta sebagai pusat. dan perkembangan PU hingga dewasa ini dapat dibagi dalam berbagai tahap, yaitu :

1. Tahun 1945 sampai Tahun 1964

Merupakan tahap awal dengan perkembangan yang masih sangat rawan, pada tahap ini selain dapat membangun sarana jalan, gedung-gedung maupun untuk kepentingan para penjajah yang ada di wilayah RI, dengan nama Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Tahun 1964 sampai Tahun 1970

Merupakan tahap selanjutnya karena pada tahap ini dapat dilihat perkembangan yang sedikit menggembirakan karena pada tahun ini Departemen Pekerjaan Umum (PU) telah ditetapkan menjadi bagian dari Cipta Karya Provinsi Sulawesi Selatan.

3. Tahun 1970 sampai Tahun 1984

Pada periode ini perkembangan pembangunan dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum sangat menggembirakan walaupun pada tahap ini juga Dinas Pekerjaan Umum dituntut untuk selalu meningkatkan sarana

perhubungan dan perumahan, dan tahap ini juga Departemen PU mempunyai sebutan sebagai bidang Cipta Karya yang ada di Ujung Pandang.

4. Tahun 1986 sampai Tahun 2001

Pada periode ini dikeluarkan SK Gubernur nomor 241/111/tahun 1991, tentang pembentukan Dinas PU Cipta Karya Provinsi Sulawesi Selatan yang harus mampu tumbuh berkembang dengan kekuatan sendiri. Oleh karena itu usaha-usaha peningkatan terciptanya pembangunan yang kuat, dan ini merupakan basis untuk mewujudkan saran dan tujuan Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) oleh pemerintah.

5. Tahun 2001 sampai 2016

Sesuai dengan peraturan daerah Provinsi Sulawesi Selatan nomor 16 tanggal 31 Januari 2001, tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan maka periode ini Dinas Pekerjaan Umum (PU) Cipta Karya berganti nama menjadi Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan.

6. Tahun 2017 sampai sekarang

Berubah nama menjadi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan

2) Tujuan Didirikannya Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan

Tujuan didirikannya Dinas Tata Ruang dan Pemukiman adalah untuk mensejahterakan warga Negara dan masyarakat Bangsa Indonesia karena dengan adanya Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Propinsi Sulawesi Selatan yang berfungsi sebagai perangkat pemerintah dan penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian pembangunan bidang perumahan bagi pemukiman serta

pemanfaatan dan pengandilaan Tata Ruang dan Pemukiman melalui kegiatan perumahan dan pemukiman yang bersifat desentralisasi maupun dekonsentrasi yang sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Sulawesi Selatan.

3) Visi dan Misi Organisasi

1. Visi

“Terwujudnya Lingkungan Permukiman dan Perumahan Yang Layak Huni Serta Pengelolaan Tanah Bagi Kemakmuran Masyarakat”.

2. Misi

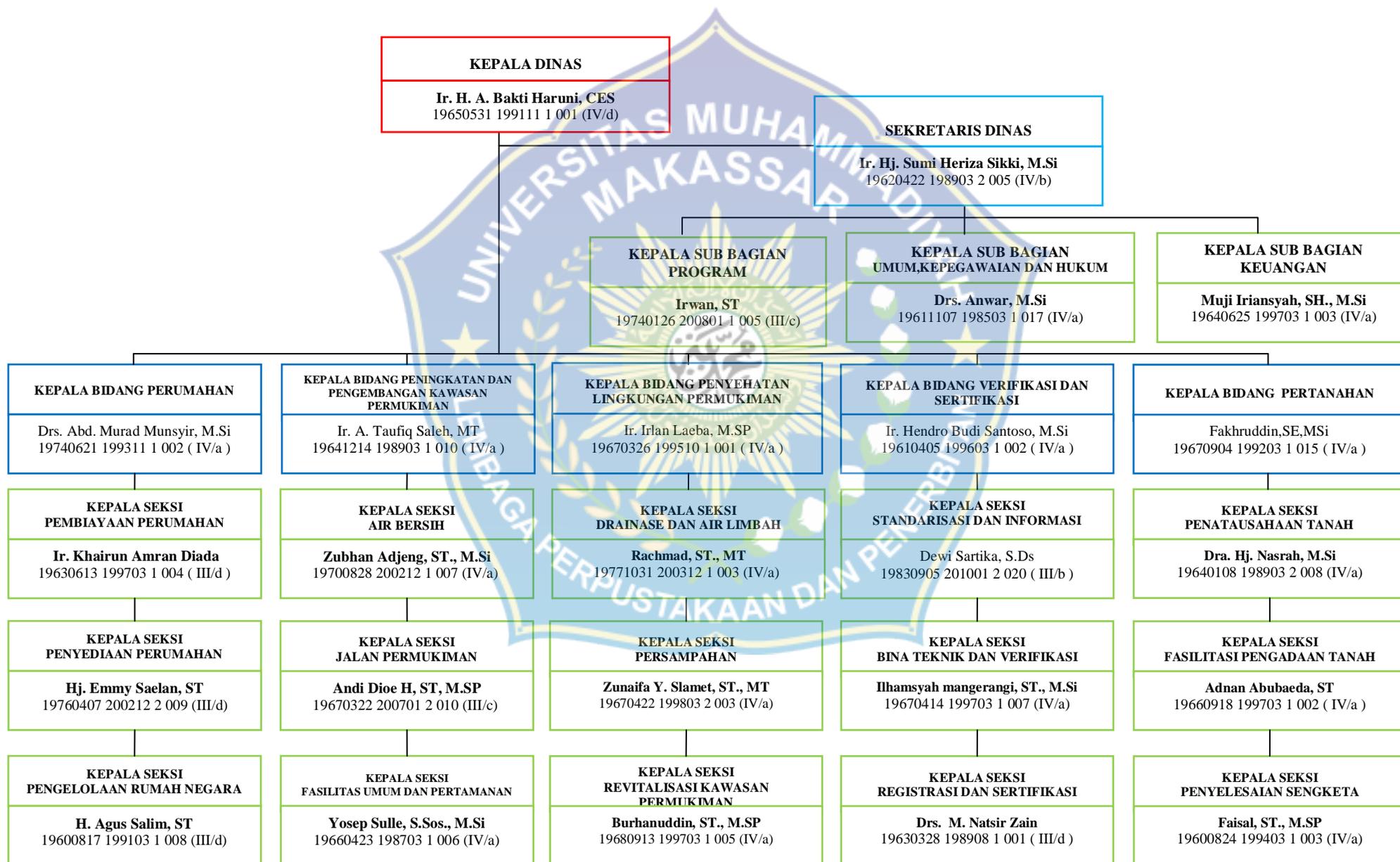
- Mewujudkan Kualitas Permukiman Yang Tertib dan Sehat, Berwawasan Lingkungan Serta Berkelanjutan.
- Mewujudkan Perumahan Yang Terjangkau dan Layak Huni.
- Mewujudkan Pengelolaan Tanah Yang Berkualitas Dan Berkeadilan.
- Mewujudkan Tata Kelola Administrasi Kelembagaan serta Kapasitas dan Kinerja Aparat yang berkualitas.



4) Struktur Organisasi dan Job Description

Gambar 4.1

1. Struktur Organisasi



2. Job Description

a. Kepala Dinas

Kepala dinas mempunyai tugas dalam membantu Gubernur menyelenggarakan urusan pemerintah Bidang pekerjaan umum dan Penataan ruang Khususnya Dinas perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan. Mempunyai tugas memimpin dan mengarahkan, menerapkan kebijaksanaan program kerja serta menagwasi pelaksanaan tugas sesuai undang-undang yang berlaku. Untuk menyelenggarakan tugas.

b. Sekertaris Dinas

Membantu kepala dinas dalam Mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, penyajian data dan informasi serta penyusunan laporan. Mempunyai tugas menyelenggarakan serta memberikan pelayanan administrative kepada semuasatuan dinas, melakukan koordinasi dan pembinaan dalam urusan ketatausahaan, hubungan masyarakat, perlengkapan kerumah tanggan dinas, kepegawaian, keuangan, perencanaan, pegawai, pengendalian, evaluasi dan pelaporan.

c. Kasubag Umum, Kepegawaian Dan Hukum

Membantu sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketata usahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan pengapusan barang, urusan rumah tangga serta mengelolah administrasi kepegawaian dan hukum.

d. Kasubag Program

Membantu sekretaris dan mengumpulkan bahan dan mengelolah penyusunan program, penyajian data dan informasi serta penyusunan laporan.

Fungsi :

1. Pelaksanaan kebijakan teknis sub bagian program dan keuangan.
2. Pelaksanaan program dan kegiatan sub bagian progra keuangan.
3. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kebijakan dalam lingkup sub bagian program dan keuangan.
4. Pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup sub bagian program dan keuangan.

e. Kasubag Keuangan

Membantu sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan mengumpulkan pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan.

Fungsi :

5. Pelaksanaan kebijakan teknis sub bagian program dan keuangan.
6. Pelaksanaan program dan kegiatan sub bagian progra keuangan.
7. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kebijakan dalam lingkup sub bagian program dan keuangan.
8. Pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup sub bagian program dan keuangan.

f. Kepala Bidang Perumahan

Berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas. Bidang perumahan dipimpin oleh kepala bidang. Bidang Perumahan mempunyai

tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan kegiatan di bidang perumahan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalampasal 14 bidang perumahan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan pengendalian pembangunan perumahan
 2. Pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan pengembangan perumahan swadaya.
 3. Pelaksanaan koordinasi supervisi dan penetapan lokasi pengembangan perumahan.
 4. Pelaksanaan pemberian rekomendasi izin bagi pengembangan perumahan.
 5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.
- g. Kepala Bidang Peningkatan Dan Pengembangan Kawasan Permukiman
- Penyiapan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan kegiatan di bidang kawasan permukiman dan penyiapan bahan penyusunan program, petunjuk teknis dan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan di bidang pengembangan kawasan permukiman.

Melaksanakan tugas :

1. Menyiapkan bahan perumusan, kebijakan teknis pengembangan kawasan permukiman.
2. Melaksanakan kebijakan teknis pengembangan kawasan permukiman.
3. Penyusunan bahan kebijakan strategi operasional serta NSPK penyehatan kawasan permukiman.

4. Menyusun standar operasional prosedur SOP seksi pengembangan kawasan permukiman.
 5. Pemberian penilaian prestasi kerja bawahan melalui sasaran kinerja pegawai (SKP).
 6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala bidang.
- h. Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman
- 1) Melaksanakan survey, mendata, menginverisasikan dan menginformasikan wilayah pengembangan.
 - 2) Melaksanakan penyusunan dan menyempurnakan data data tentang pengembangan wilayah permukiman.
 - 3) Penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan dan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
 - 4) Penyediaan sarana dan prasarana perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
 - 5) Menetap lokasi perumahan dan permukiman dan kumuh sebagai perumahan dan permukiman.
 - 6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- i. Kepala Bidang Verifikasi dan Sertifikasi
- 1) Menyiapkan bahan dan penyusunan kegiatan pengelolaan verifikasi anggaran.
 - 2) Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan pengelolaan verifikasi pembayaran.

3) Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan pengolaan verifikasi penggajian.

j. Kepala Bidang Pertanahan

Kepala bidang pertanahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengadaan, penggunaan dan penyelesaian sengketa tanah yang meliputi tanah garapan, ganti kerugian tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah dan penyelesaian masalah tanah kosong dalam daerah kabupaten.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 bidang pertanahan menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengadaan, penggunaan, dan penyelesaian sengketa tanah.
2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pengadaan dan penggunaan tanah.
3. Koordinasi pelaksanaan penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah kabuten.
4. Koordinasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pengembangan oleh pemerintah daerah.
5. Penentuan subjek dan objek retribusi tanah.
6. Penyelesaian masalah tanah kosong dalam daerah kabupaten.
7. Pelaksanaan inventarisasi dn pemamfaatan tanah kosong, dan pemberian rekomendasi penertiban izin membuka tanah.

B. Penyajian Data (Hasil Penelitian)

Tabel 4.1

**Laporan Anggaran Dan Realisasi Anggaran Belanja
Pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahaan
Provinsi Sulawesi Selatan**

Tahun	Anggaran	Realisasi	Sisa Pagu Anggaran
2015	175.140.288.406,00	169.441.391.098,00	5.698.897.308,00
2016	135.284.238.497,75	119.225.950.226,00	16.058.288.271,75
2017	98.324.068.750,54	94.084.350.941,00	4.239.717.809,54

Sumber: Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan.

Tabel 4.2

**Laporan Anggaran Dan Realisasi Anggaran Belanja Langsung
Pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahaan
Provinsi Sulawesi Selatan**

Tahun	Belanja Langsung	Realisasi	Sisa Anggaran
2015	158.591.685.000,00	153.195.099.036,00	5.396.585.964,00
2016	119.555.610.668,75	103.631.848.132,00	15.941.762.536,75
2017	82.359.805.269,00	79.856.909.460,00	2.502.895.809,00

Sumber: Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan.

Tabel 4.3

**Laporan Anggaran Dan Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung
Pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahaan
Provinsi Sulawesi Selatan**

Tahun	Belanja Tidak Langsung	Realisasi	Sisa Anggaran
2015	16.548.603.406,00	16.246.292.062,00	302.311.344,00
2016	15.728.627.829,00	15.612.102.094,00	116.525.735,00
2017	15.964.263.481,54	14.227.441.481,00	1.736.822.000,54

Sumber: Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan.

C. Analisis Dan Interpretasi (Pembahasan)

Pembahasan hasil penelitian akan membahas bagaimana tingkat efektivitas pelaksanaan anggaran belanja untuk menilai kinerja keuangan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahaan Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan menggunakan rasio efektivitas terhadap pelaksanaan anggaran belanja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahaan Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2015 sampai 2017.

1. Analisis Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahaan Provinsi Sulawesi Selatan

Belanja langsung pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan antara lain program pelayanan administrasi perkantoran, program peningkatan kapasitas dan kinerja SKPD, peningkatan pembangunan sistem perencanaan dan sistem evaluasi kinerja, program penyelenggaraan penataan ruang, program pengembangan permukiman dan

perumahan, program pengembangan pengelolaan air minum dan penyehatan lingkungan.

Efektivitas adalah hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan.

$$Efektivitas = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

a. Tahun 2015

$$Efektivitas = \frac{153.195.099.036,00}{158.591.685.000,00} \times 100\% \\ = 96,60\%$$

Pada tahun 2015 rasio efektivitas pelaksanaan anggaran belanja langsung Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan adalah 96,60%. Itu berarti Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan dinilai efektif dalam pelaksanaan anggaran belanja langsung rasio efektifnya 90%-100%, hal ini berarti Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2015 menunjukkan kinerja keuangan yang sangat baik pada anggaran belanja langsung.

b. Tahun 2016

$$Efektivitas = \frac{103.631.848.132,00}{119.555.610.668,75} \times 100\% \\ = 86,68\%$$

Pada tahun 2016 rasio efektivitas pelaksanaan anggaran belanja langsung Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Sulawesi

Selatan adalah 86,68%. Itu berarti Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan dinilai cukup efektif dalam pelaksanaan anggaran belanja rasio efektifnya 80%-90% hal ini berarti Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2016 menunjukkan kinerja keuangan yang cukup baik pada anggaran belanja langsung.

c. Tahun 2017

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas} &= \frac{79.856.909.460,00}{82.359.805.269,00} \times 100\% \\ &= 96,96\% \end{aligned}$$

Pada tahun 2017 rasio efektivitas pelaksanaan anggaran belanja langsung Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan adalah 96,96%. Itu berarti Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan dinilai efektif dalam pelaksanaan anggaran belanja rasio efektifnya 90%-100%, hal ini berarti Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2017 menunjukkan kinerja keuangan yang sangat baik pada anggaran belanja langsung.

Tabel 4.4
Hasil Perhitungan Belanja Langsung
Pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahaan
Provinsi Sulawesi Selatan

Tahun	Belanja Langsung	Realisasi	Rasio	Kriteria
2015	158.591.685.000,00	153.195.099.036,00	96,60%	Efektif
2016	119.555.610.668,75	103.631.848.132,00	86,68%	Cukup Efektif
2017	82.359.805.269,00	79.856.909.460,00	96,96%	Efektif

Belanja langsung pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan antara lain program pelayanan administrasi perkantoran, program peningkatan kapasitas dan kinerja SKPD, peningkatan pembangunan sistem perencanaan dan sistem evaluasi kinerja, program penyelenggaraan penataan ruang, program pengembangan permukiman dan perumahan, program pengembangan pengelolaan air minum dan penyehatan lingkungan.

2. Analisis Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahaan Provinsi Sulawesi Selatan

Belanja tidak langsung pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan, terdiri dari gaji dan tunjangan, gaji pokok/uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan fungsional, tunjangan fungsional umum, tunjangan beras, tunjangan khusus, pembulatan gaji, iuran asuransi kesehatan iuran asuransi kecelakaan

kerja/kematian, dan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya.

Efektivitas adalah hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan.

$$Efektivitas = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

a. Tahun 2015

$$Efektivitas = \frac{16.246.292.062,00}{16.548.603.406,00} \times 100\% \\ = 98,17\%$$

Pada tahun 2015 rasio efektivitas pelaksanaan anggaran belanja tidak langsung Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan adalah 98,17%. Itu berarti Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan dinilai efektif dalam pelaksanaan anggaran belanja rasio efektifnya 90%-100%, hal ini berarti Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2015 menunjukkan kinerja keuangan yang sangat baik pada anggaran belanja tidak langsung.

b. Tahun 2016

$$Efektivitas = \frac{15.612.102.094,00}{15.728.627.829,00} \times 100\% \\ = 99.26\%$$

Pada tahun 2016 rasio efektivitas pelaksanaan anggaran belanja tidak langsung Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan adalah 99,26%. Itu berarti Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan dinilai efektif dalam pelaksanaan anggaran belanja rasio efektifnya 90%-100%, hal ini berarti Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2016 menunjukkan kinerja keuangan yang sangat baik pada anggaran belanja tidak langsung.

c. Tahun 2017

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas} &= \frac{14.227.441.481,00}{15.964.263.481,54} \times 100\% \\ &= 89,12\% \end{aligned}$$

Pada tahun 2017 rasio efektivitas pelaksanaan anggaran belanja tidak langsung Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan adalah 89,12%. Itu berarti Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan dinilai cukup efektif dalam pelaksanaan anggaran belanja rasio efektifnya 80%-90%, hal ini berarti Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2015 menunjukkan kinerja keuangan yang cukup baik pada anggaran belanja tidak langsung.

Tabel 4.5
Hasil Perhitungan Belanja Tidak Langsung
Pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahaan
Provinsi Sulawesi Selatan

Tahun	Belanja Tidak Langsung	Realisasi	Rasio	Kriteria
2015	16.548.603.406,00	16.246.292.062,00	98,17%	Efektif
2016	15.728.627.829,00	15.612.102.094,00	99.26%	Efektif
2017	15.964.263.481,54	14.227.441.481,00	89,12%	Cukup Efektif

Belanja tidak langsung pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan, terdiri dari gaji dan tunjangan, gaji pokok/uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan fungsional, tunjangan fungsional umum, tunjangan beras, tunjangan khusus, pembulatan gaji, iuran asuransi kesehatan iuran asuransi kecelakaan kerja/kematian, dan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya.

3. Analisis Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Belanja Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahaan Provinsi Sulawesi Selatan

Efektivitas adalah hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan.

Pengukuran kinerja keuangan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahaan Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2015 sampai 2017. Dalam

pelaksanaan anggaran belanja pengukuran yang digunakan adalah rasio efektivitas atau membandingkan realisasi anggaran belanja dengan anggaran belanja dikali dengan 100%.

$$Efektivitas = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Kriteria efektivitas Sumber: Kepmendagri Tahun 1996 NO. 690.900.327.2019

- a. 100% ke atas sangat efektif
- b. 90% sampai 100% efektif
- c. 80% sampai 90% cukup efektif
- d. 60% sampai 80% kurang efektif
- e. Kurang dari 60% tidak efektif

Tingkat efektivitas anggaran belanja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2015 sampai 2017 setiap tahunnya yaitu:

a. Tahun 2015

$$Efektivitas = \frac{169.441.391.098,00}{175.140.288.406,00} \times 100\%$$

$$= 96,74\%$$

Pada tahun 2015 rasio efektivitas pelaksanaan anggaran belanja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan adalah 96,74%. Itu berarti Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan dinilai efektif dalam pelaksanaan anggaran belanja rasio efektifnya 90%-100%, hal ini berarti Dinas Perumahan

Kawasan Permukiman Dan Pertanahaan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2015 menunjukkan kinerja keuangan yang sangat baik.

b. Tahun 2016

$$\begin{aligned} Efektivitas &= \frac{119.225.950.226,00}{135.284.238.497,75} \times 100\% \\ &= 88,12\% \end{aligned}$$

Pada tahun 2015 rasio efektivitas pelaksanaan anggaran belanja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahaan Provinsi Sulawesi Selatan adalah 88,12%. Itu berarti Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahaan Provinsi Sulawesi Selatan dinilai cukup efektif dalam pelaksanaan anggaran belanja rasio efektifnya 80%-90% hal ini berarti Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahaan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2016 menunjukkan kinerja keuangan yang cukup baik.

c. Tahun 2017

$$\begin{aligned} Efektivitas &= \frac{94.084.350.941,00}{98.324.068.750,54} \times 100\% \\ &= 95,68\% \end{aligned}$$

Pada tahun 2017 rasio efektivitas pelaksanaan anggaran belanja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahaan Provinsi Sulawesi Selatan adalah 95,68%. Itu berarti Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahaan Provinsi Sulawesi Selatan dinilai efektif dalam pelaksanaan anggaran belanja rasio efektifnya 90%-100%, hal ini berarti Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahaan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2017 menunjukkan kinerja keuangan yang sangat baik.

Tabel 4.6

**Hasil Perhitungan Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Belanja
Tahun 2015 Sampai 2017**

Tahun	Anggaran Belanja	Realisasi Anggaran	Rasio (%)	Kriteria
2015	175.140.288.406,00	169.441.391.098,00	96,74%	Efektif
2016	135.284.238.497,75	119.225.950.226,00	88,12%	Cukup efektif
2017	98.324.068.750,54	94.084.350.941,00	95,68%	efektif

Berdasarkan tingkat efektivitas anggaran belanja tertinggi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahaan Provinsi Sulawesi Selatan telah mencapai efektif dan cukup efektif. Rasio efektivitas tertinggi berada pada tahun 2015 yaitu 96,74%, dengan kriteria efektif, pada tahun 2015 anggaran belanja sebesar Rp 175.140.288.406,00 dan terealisasi sebesar Rp 169.441.391.098,00.

Berdasarkan tingkat efektivitas anggaran belanja terendah Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahaan Provinsi Sulawesi Selatan telah mencapai efektif dan cukup efektif. Rasio efektivitas terendah berada pada tahun 2016 yaitu 88,12%, dengan kriteria cukup efektif, pada tahun 2016 anggaran belanja sebesar Rp 135.284.238.497,75 dan terealisasi sebesar Rp 119.225.950.226,00.

Penyebab adanya anggaran belanja yang tidak terealisasi pada anggaran belanja tidak langsung adalah, estimasi anggaran gaji misalnya jumlah pegawai 192 namun di estimasikan 200 untuk mengantisipasi adanya pegawai pindahan dari dinas lain. Sedangkan anggaran belanja langsung penyebab tidak terealisasinya anggaran adalah sistem tender. Terjadi akibat cuaca, dan lokasi susah di

jangkausehingga anggaran yang dianggarkan di tahun anggaran tidak terealisasi keseluruhan.

Tabel 4.7

Hasil perhitungan tingkat efektivitas anggaran belanja langsung, anggaran belanja tidak langsung, dan anggaran secara keseluruhan pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan

Tahun	2015	2016	2017
Rasio efektivitas anggaran belanja langsung	96,60%	86,68%	96,96%
Kriteria	Efektif	Cukup efektif	Efektif
Rasio efektivitas anggaran belanja tidak langsung	98,17%	99,26%	89,12%
Kriteria	Efektif	Efektif	Cukup efektif
Rasio efektivitas anggaran belanja keseluruhan	96,74%	88,12%	95,68%
Kriteria	Efektif	Cukup efektif	Efektif

Berdasarkan tingkat efektivitas anggaran belanja langsung, anggaran belanja tidak langsung, dan anggaran belanja secara keseluruhan tertinggi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan telah mencapai efektif dan cukup efektif. Rasio efektivitas tertinggi anggaran belanja langsung berada pada tahun 2017 yaitu 96,96%, dengan kriteria efektif, pada anggaran belanja tidak langsung rasio efektivitas tertinggi berada pada tahun 2015

yaitu 98,17%, dengan kriteria efektif, sedangkan rasio efektivitas anggaran secara keseluruhan berada pada tahun 2015 yaitu 96,74% dengan kriteria efektif.

Berdasarkan tingkat efektivitas anggaran belanja langsung terendah Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan telah mencapai efektif dan cukup efektif. Rasio efektivitas terendah anggaran belanja langsung berada pada tahun 2016 yaitu 86,68% dengan kriteria cukup efektif, pada anggaran belanja tidak langsung tingkat efektivitas terendah berada pada tahun 2017 yaitu 89,12% dengan kriteria cukup efektif dan untuk anggaran belanja secara keseluruhan tingkat efektivitas terendah berada pada tahun 2016 yaitu 88,12% dengan kriteria cukup efektif.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil perhitungan maka disimpulkan bahwa tingkat efektivitas pelaksanaan anggaran belanja Dinas perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan sudah maksimal dan kinerja keuangan Dinas perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan berhasil ini dinilai dari tingkat efektivitas sebagai berikut:

Berdasarkan hasil perhitungan anggaran belanja keseluruhan tahun 2015 sebesar 96,74% dan tahun 2017 sebesar 95,68%, dilihat dari perhitungan tersebut kinerja keuangan Dinas perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan sudah efektif. Pada tahun 2016 sebesar 88,12%, kinerja keuangan Dinas perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan cukup efektif.

Berdasarkan tingkat efektivitas anggaran belanja langsung, anggaran belanja tidak langsung, dan anggaran belanja secara keseluruhan tertinggi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan telah mencapai efektif dan cukup efektif. Rasio efektivitas tertinggi anggaran belanja langsung berada pada tahun 2017 yaitu 96,96%, dengan kriteria efektif, pada anggaran belanja tidak langsung rasio efektivitas tertinggi berada pada tahun 2015 yaitu 98,17%, dengan kriteria efektif, sedangkan rasio efektivitas anggaran secara keseluruhan berada pada tahun 2015 yaitu 96,74% dengan kriteria efektif.

Berdasarkan tingkat efektivitas anggaran belanja langsung terendah Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan telah mencapai efektif dan cukup efektif. Rasio efektivitas terendah anggaran belanja langsung berada pada tahun 2016 yaitu 86,68% dengan kriteria cukup efektif, pada anggaran belanja tidak langsung tingkat efektivitas terendah berada pada tahun 2017 yaitu 89,12% dengan kriteria cukup efektif dan untuk anggaran belanja secara keseluruhan tingkat efektivitas terendah berada pada tahun 2016 yaitu 88,12% dengan kriteria cukup efektif

B. Saran

Sebagai dasar pertimbangan bagi pimpinan dan staf di Dinas Perumahan Kawasan, Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan, untuk lebih mengoptimalkan semua sumber daya yang ada untuk memperbaiki pengelolaan dalam penggunaan anggaran belanja agar tingkat efektivitasnya dapat di tingkatkan.



Daftar Pustaka

- Adisaputro, Gunawan, 2017, *Anggaran Perusahaan*, Bukul, BPFE, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Anggaran belanja dan realisasi anggaran dinas perumahan kawasan permukiman dan pertanahan provinsi sulawesi selatan
- Astria Nur Jannah Dien Dkk, 2015, *Analisi Laporan Realisasi Anggaran Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung*, Jurnal Emba, Vol.3 No.1, ISSN 2303-1174
- Basri Ramlah. 2013. *mengenai analisis penyusunan anggaran dan laporan realisasi anggaran pada bpm-pd provinsi sulawesi utara*. Jurnal EMBA. Vol.1 No.4 Desember 2013, Hal. 202-212. ISSN 2303-1174
- Halim, A. & Kusufi, M. S. (2014). *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Edisi ke-2, Yogyakarta: Salemba Empat.
- Harry Saputra Liando Dkk, 2014, *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Menggunakan Metode Value For Money*, Jurnal Emba, Vol.2 No.3, ISSN 2303-1174
- Hery.2015. *Analisis Laporan keuangan*. Edisi satu. Yogyakarta.
- Honga A. F. dan ventje I. 2014. *mengenai analisis realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah pemerintah kota bitung*. Jurnal EMBA. Vol.2 No.4 Desember 2014, Hal. 278-288. ISSN 2303-1174
- Immanuel Pangkey dan Sherly Pinatik, 2015, *Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara*, Jurnal Emba, Vol.3 No.4, ISSN 2303-1174
- Indra, Bastian, 2016, *Akuntansi Sektor Publik*, Edisi.3, Jakarta : Erlangga
- Jumingan, 2014, *Analisis Laporan Keuangan*, Jakarta : Bumi Aksara
- Keputusan Menteri Dalam Negeri (KEPMENDAGRI) No. 690.900.327 Tahun 2006. *Tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Mahmudi, 2015, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Edisi ketiga. Yogyakarta
- Mahsun, Mohamad, 2013, *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*, Edisi Pertama, BPFE Yogyakarta.

- Mangkunegara. 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Perusahaan Bandung: PT Remaja Rosda Karya
- Mardiasmo, 2014, *Akuntansi Sektor Publik*, Edisi Keempat, Yogyakarta: CV Andi
- Mulyadi, 2013, *Akuntansi Manajemen*, Edisi ke 3, Jakarta: Salemba Empat.
- Mulyadi. 2015. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Penerbit in Media : jakarta
- Munandar, M. 2014. *Budgeting Perencanaan Kerja Pengkoordinasian Kerja Pengawasan Kerja*.Yogyakarta :BPFE.
- Nafarin, M. 2013. *Penganggaran Perusahaan*. Jakarta :Salemba Empat.
- Palilingan A. F. dkk. 2015. *mengenai analisis kinerja belanja dalam laporan realisasi anggaran (Ira) pada dinas pendapatan kota manado*. Jurnal EMBA.Vol.3 No.1 Maret 2015, Hal. 17-25. ISSN 2303-1174
- Pemendagri , Tahun 2007 No. 56 *Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah*
- Pemerintah republik indonesia. 2011 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21. *Tentang Klarifikasi Belanja*. Jakarta
- Peraturan menteri keuangan nomor 101/PMK.02/2011 tentang klasifikasi anggaran
- Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005.*Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Putra M. I. 2017. *menegenai proses penyusunan anggaran pada dinas pendidikan pemuda dan olahraga kabupaten sleman Yogyakarta*. Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT Vol. 2, S1, September 2017: 271 – 280 P-ISSN 2527–7502 E-ISSN 2581-2165.
- Rudianto 2013. *Akuntansi Manajemen Informasi Untuk Pengambilan Keputusan* . Jakarta: Erlangga.
- Rukayah Dkk, 2017 *Analisis Laporan Realisasi Anggaran Dengan Menggunakan Rasio Efektivitas Dan Rasio Efisiensi Pada Kantor Badan Perijinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Serang*, Jurnal Akuntansi, Vol.4 No.2, ISSN 2549-5968
- Sasongko dan Parulian. 2015. *Anggaran*. Jakarta: Salemba Empat.

Siti Basyariah, 2017, *Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintah Desa (BPMPD) Daerah Provinsi Sulawesi Tengah*, Jurnal Katalogis, Vol.5 No.6, ISSN 2302-2019

Sri Rahayu dan Andry Arifian Rachman, 2013, *Penyusunan Anggaran Perusahaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Welio Wonda, 2016, *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Masa Otonomi Daerah Kabupaten Nabire Provinsi Papua*, Jurnal Emba, Vol.4 No.3, ISSN 2303-1174

Wibowo, 2014, *Manajemen Perubahan*, Edisi ke 3, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.





**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PER BAGIAN**

S K P D : Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Dan Pertanahan
Pengguna Anggaran : Ir. H. ANDI BAKTI HARUNI, CES
Bendahara Pengeluaran : Hj. I SIDA, SE
Bagian :
Tahun Anggaran : 2015
Bulan : Desember

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	%	Sisa Pagu Anggaran
1	2	3	4	5=3-2
BELANJA DAERAH	175.140.288.406,00	169.441.391.098, 00	96,74	5.698.897.308,00
Gaji dan Tunjangan	11.667.403.406,00	11.654.122.062,00	99,88	13.281.344,00
Gaji Pokok/Uang Representasi 1)	9.055.527.825,66	9.053.295.256,00	99,97	2.232.569,66
Tunjangan Keluarga	906.009.972,88	906.003.683,00	99,99	6.289,88
Tunjangan Jabatan 2)	308.481.000,00	308.030.000,00	99,85	451.000,00
Tunjangan Fungsional	3.800.000,00	-	-	3.800.000,00
Tunjangan Fungsional Umum	399.746.500,00	394.785.000,00	98,75	4.961.500,00
Tunjangan Beras 1)	489.531.750,00	489.087.360,00	99,90	444.390,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	214.832.493,46	213.574.072,00	99,41	1.258.421,46
Pembulatan Gaji	150.000,00	134.508,00	89,67	15.492,00
Iuran Asuransi Kesehatan	266.623.864,00	266.623.864,00	100,00	-
Iuran Asuransi Kecelakaan Kerja/Kematian	22.700.000,00	22.588.319,00	99,50	111.681,00
Tambahan Penghasilan PNS	4.881.200.000,00	4.592.170.000,00	94,07	289.030.000,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	4.881.200.000,00	4.592.170.000,00	94,07	289.030.000,00
Program : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	8.286.825.000,00	7.802.271.664,00	94,15	484.553.336,00
Kegiatan : Penatausahaan Administrasi dan Pemeliharaan Prasarana Sarana Perkantoran	6.288.250.000,00	5.922.176.214,00	94,17	366.073.786,00
Kegiatan : Penatausahaan Pelayanan Kehumasan SKPD	329.000.000,00	244.665.000,00	74,36	84.335.000,00
Kegiatan : Penatausahaan Unit Layanan Pengadaan SKPD	716.675.000,00	716.322.300,00	99,95	352.700,00
Kegiatan : Penatalaksanaan KORPRI SKPD	49.600.000,00	49.195.000,00	99,18	405.000,00
Kegiatan : Penatausahaan Simpul Koordinasi dan Konsultasi SKPD	903.300.000,00	869.913.150,00	96,30	33.386.850,00
Program : Program Peningkatan Kapasitas Dan Kinerja SKPD	1.757.375.000,00	1.394.780.000,00	79,36	362.595.000,00
Kegiatan : Penatausahaan Adminstrasi Keuangan	1.128.900.000,00	934.910.000,00	82,81	193.990.000,00
Kegiatan : Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD	137.700.000,00	136.700.000,00	99,27	1.000.000,00

Kegiatan : Penatausahaan Administrasi Kepegawaian	327.100.000,00	193.495.000,00	59,15	133.605.000,00
Kegiatan : Penatausahaan Administrasi Asset Daerah SKPD	163.675.000,00	129.675.000,00	79,22	34.000.000,00
Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan Dan Sistem Evaluasi Kinerja	1.745.980.000,00	1.704.095.500,00	97,60	41.884.500,00
Kegiatan : Penyusunan Program - Kegiatan dan RKA - DPA SKPD	268.875.000,00	263.711.200,00	98,07	5.163.800,00
Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja SKPD	226.405.000,00	223.475.700,00	98,70	2.929.300,00
Kegiatan : Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Perencanaan	962.600.000,00	930.084.400,00	96,62	32.515.600,00
Kegiatan : Fasilitasi dan Partisipasi Pameran Pembangunan SKPD	229.300.000,00	228.625.000,00	99,70	675.000,00
Kegiatan : Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja SKPD	58.800.000,00	58.199.200,00	98,97	600.800,00
Program : Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	12.293.343.000,00	11.950.444.525,00	97,21	342.898.475,00
Kegiatan : Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan/Wilayah	5.043.268.500,00	4.922.552.453,00	97,60	120.716.047,00
Kegiatan : Sosialisasi Pedoman Penyusunan Kawasan Strategis Provinsi dan RDTR Kab./Kota	247.275.000,00	247.275.000,00	100,00	-
Kegiatan : Koordinasi Rencana Tata Ruang Lintas Kab./Kota	171.750.000,00	158.820.682,00	92,47	12.929.318,00
Kegiatan : Sinkronisasi Penyusunan Program Kawasan Strategis Provinsi/Nasional	402.550.000,00	399.265.700,00	99,18	3.284.300,00
Kegiatan : Pembinaan Pemanfaatan Ruang	2.747.280.000,00	2.722.277.700,00	99,08	25.002.300,00
Kegiatan : Monitoring/Evaluasi Pemanfaatan Ruang	323.900.000,00	285.951.849,00	88,28	37.948.151,00
Kegiatan : Koordinasi Pengendalian Tata Ruang Lintas Kab./Kota	169.400.000,00	158.033.000,00	93,28	11.367.000,00
Kegiatan : Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	598.000.000,00	579.482.100,00	96,90	18.517.900,00
Kegiatan Peningkatan Kualitas Aparatur dan Kelembagaan KSN Perkotaan Metropolitan Mamminasata	193.000.000,00	184.723.600,00	95,71	8.276.400,00
Kegiatan : Penyusunan Data dan Informasi Kawasan Strategis Nasional Mamminasata	649.600.000,00	636.359.771,00	97,96	13.240.229,00
Kegiatan : Koordinasi dan Pengendalian Kawasan Strategis Nasional Mamminasata	590.560.000,00	575.676.550,00	97,47	14.883.450,00
Kegiatan Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Kawasan Strategis Nasional Mamminasata	179.000.000,00	168.163.100,00	93,94	10.836.900,00
Kegiatan : Pelaksanaan PPMU Persampahan Mamminasata	243.000.000,00	231.896.270,00	95,43	11.103.730,00
Kegiatan : Penatausahaan Administrasi Perkantoran UPTD Mamminasata	511.759.500,00	472.912.250,00	92,40	38.847.250,00
Kegiatan : Pelaksanaan PPMU Air Bersih Mamminasata	223.000.000,00	207.054.500,00	92,84	15.945.500,00
Program : Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman	106.192.614.000,00	102.801.853.057,00	96,80	3.390.760.943,00
Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat Wilayah I	10.408.100.000,00	10.392.908.400,00	99,85	15.191.600,00
Kegiatan : Pembangunan Infrastruktur Perumahan Masyarakat Kurang	2.894.100.000,00	2.864.126.850,00	98,96	29.973.150,00
	83.200.000,00	82.348.900,00	98,97	851.100,00

Kegiatan : Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perumahan	143.000.000,00	141.098.100,00	98,67	1.901.900,00
Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan	91.700.000,00	86.928.700,00	94,79	4.771.300,00
Kegiatan : Strategis Penetapan Kebijakan Perumahan dan Permukiman	9.636.870.000,00	9.588.217.750,00	99,49	48.652.250,00
Kegiatan : Peningkatan Kualitas Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	100.000.000,00	99.744.050,00	99,74	255.950,00
Kegiatan : Penyuluhan dan Pengawasan Kualitas Lingkungan Sehat Perumahan	150.000.000,00	148.541.700,00	99,02	1.458.300,00
Kegiatan : Pelaksanaan PPMU - PPIP Tingkat Provinsi	6.945.565.000,00	6.893.859.050,00	99,25	51.705.950,00
Kegiatan : Pelaksanaan PPMU - PPIP Tingkat Provinsi	400.520.000,00	387.749.607,00	96,81	12.770.393,00
Kegiatan : Penataan Infrastruktur Lingkungan Kawasan Strategis	315.400.000,00	314.395.000,00	99,68	1.005.000,00
Kegiatan : Pembinaan dan Peningkatan Kinerja Aparatur Pengembangan Sumber Daya Lokal	699.950.000,00	692.512.350,00	98,93	7.437.650,00
Kegiatan : Penyusunan Harga Satuan dan Pemetaan Bahan Bangunan Lokal	420.830.000,00	419.008.000,00	99,56	1.822.000,00
Kegiatan : Penguatan Sistem Pengujian Bahan Bangunan Lokal	476.750.000,00	251.544.450,00	52,76	225.205.550,00
Kegiatan : Pengelolaan Pusat Informasi Pengembangan Permukiman dan Bangunan (PIP2B)	357.800.000,00	313.055.150,00	87,49	44.744.850,00
Kegiatan : Pembangunan dan Peningkatan Bangunan dan Lingkungan Gedung	3.291.210.000,00	1.854.619.380,00	56,35	1.436.590.620,00
Kegiatan : Pembinaan Teknis Bangunan Gedung	4.333.850.000,00	4.317.168.000,00	99,61	16.682.000,00
Kegiatan : Pengembangan Nilai dan Geografi Sejarah	4.685.700.000,00	4.682.544.600,00	99,93	3.155.400,00
Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat Wilayah II	60.758.069.000,00	59.271.483.020,00	97,55	1.486.585.980,00
Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat Wilayah III				
Kegiatan : Pembangunan Gedung Wisma Negara				
Program : Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan	28.315.548.000,00	27.541.654.290,00	97,26	773.893.710,00
Kegiatan : Pembangunan dan Pengembangan Sistem Jaringan Air Minum Wilayah I	5.608.930.000,00	5.499.192.100,00	98,04	109.737.900,00
Kegiatan : Pembebasan Lahan IPA Regional Mamminasata	4.261.300.000,00	3.914.079.200,00	91,85	347.220.800,00
Kegiatan : Penyediaan Sarana Prasarana Air Limbah dan Persampahan	7.604.013.000,00	7.529.686.950,00	99,02	74.326.050,00
Kegiatan : Pembinaan Teknik Pengelolaan Air limbah dan Persampahan	268.200.000,00	263.450.000,00	98,22	4.750.000,00
Kegiatan : Pembinaan Teknik Pengelolaan Air limbah dan Persampahan	417.425.000,00	407.672.700,00	97,66	9.752.300,00
Kegiatan : Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	172.680.000,00	76.200.900,00	44,12	96.479.100,00
Kegiatan : Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	105.260.000,00	63.198.780,00	60,04	42.061.220,00

Kegiatan : PPMU - PAMSIMAS Tingkat Provinsi	105.260.000,00	55.729.860,00	52,94	49.530.140,00
Kegiatan : PPMU - AMPL Tingkat Provinsi	5.369.750.000,00	5.339.319.000,00	99,43	30.431.000,00
Kegiatan : PPMU - SANIMAS Tingkat Provinsi				
Kegiatan : Pembangunan dan Pengembangan Sistem Jaringan Air Minum Wilayah II	4.402.730.000,00	4.393.124.800,00	99,78	9.605.200,00
Kegiatan : Pembangunan dan Pengembangan Sistem Jaringan Air Minum Wilayah III				
JUMLAH	175.140.288.406,00	169.441.391.098,00	96,74	5.698.897.308,00
Penerimaan SP2D		171.106.861.452,00		
Pengeluaran SPJ (LS + UP/GU/TU)		169.441.391.098,00		
PENGEMBALIAN SISA TU		1.569.468.004,00		
PENGEMBALIAN SISA KAS		66.944.400,00		
Saldo Kas				

Makassar, 31 Desember 2015

Bendahara Pengeluaran

Hj. I SIDA, SE

NIP. 19631231 199303 2 047



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PER BAGIAN**

S K P D : Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Dan Pertanahan
Pengguna Anggaran : Ir. H. ANDI BAKTI HARUNI, CES
Bendahara Pengeluaran : Hj. I SIDA, SE
Bagian :
Tahun Anggaran : 2016
Bulan : Desember

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	%	Sisa Pagu Anggaran
1	2	3	4	5=3-2
BELANJA DAERAH	135.284.238.497,75	119.225.950.226,00	88,12	16.058.288.271,75
Gaji dan Tunjangan	11.870.836.749,00	11.848.853.874,00	99,81	21.982.875,00
Gaji Pokok/Uang Representasi 1)	9.352.861.897,00	9.352.703.047,00	99,99	158.850,00
Tunjangan Keluarga	847.501.603,00	846.393.162,00	99,86	1.108.441,00
Tunjangan Jabatan 2)	286.817.000,00	285.970.000,00	99,70	847.000,00
Tunjangan Fungsional	-	-	-	-
Tunjangan Fungsional Umum	378.206.000,00	377.535.000,00	99,82	671.000,00
Tunjangan Beras 1)	470.126.920,00	469.459.620,00	99,85	667.300,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	223.220.768,00	219.726.434,00	98,43	3.494.334,00
Pembulatan Gaji	118.789,00	118.605,00	99,84	184,00
Iuran Asuransi Kesehatan	266.383.772,00	253.159.199,00	95,03	13.224.573,00
Iuran Asuransi Kecelakaan Kerja/Kematian	45.600.000,00	43.788.807,00	96,02	1.811.193,00
Tambahan Penghasilan PNS	3.857.791.080,00	3.763.248.220,00	97,54	94.542.860,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	3.857.791.080,00	3.763.248.220,00	97,54	94.542.860,00
Program : PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	11.248.225.000,00	10.590.106.573,00	94,14	658.118.427,00
Kegiatan : Penatausahaan Administrasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Perkantoran	9.136.750.000,00	8.649.035.354,00	94,66	487.714.646,00
Kegiatan : Penatausahaan Pelayanan Kehumasan SKPD	337.700.000,00	275.460.000,00	81,56	62.240.000,00
Kegiatan : Penatausahaan Unit Layanan Pengadaan SKPD	801.875.000,00	731.872.300,00	91,27	70.002.700,00
Kegiatan : Penatalaksanaan KORPRI SKPD	59.100.000,00	42.000.000,00	71,06	17.100.000,00
Kegiatan : Penatausahaan Simpul Koordinasi dan Konsultasi SKPD	912.800.000,00	891.738.919,00	97,69	21.061.081,00
Program : PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS DAN	1.942.775.000,00	1.783.485.950,00	91,80	159.289.050,00

KINERJA SKPD				
Kegiatan : Penatausahaan Adminstrasi Keuangan	994.900.000,00	984.510.000,00	98,95	10.390.000,00
Kegiatan : Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD	119.700.000,00	101.920.000,00	85,14	17.780.000,00
Kegiatan : Penatausahaan Administrasi Kepegawaian	674.100.000,00	553.181.700,00	82,06	120.918.300,00
Kegiatan : Penatausahaan Administrasi Asset Daerah SKPD	154.075.000,00	143.874.250,00	93,37	10.200.750,00
Program PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PERENCANAAN DAN SISTEM EVALUASI KINERJA	3.148.765.668,75	3.014.526.300,00	95,73	134.239.368,75
Kegiatan : Penyusunan Program - Kegiatan dan RKA - DPA SKPD	707.685.668,75	697.555.600,00	98,56	10.130.068,75
Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja SKPD	339.480.000,00	335.612.000,00	98,86	3.868.000,00
Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Perencanaan	2.101.600.000,00	1.981.358.700,00	94,27	120.241.300,00
Program PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN	6.966.025.000,00	5.223.473.200,00	74,98	1.742.551.800,00
Kegiatan : Pembangunan Dan Pengembangan Sistem Jaringan Air Minum Wilayah I	528.500.000,00	451.778.700,00	85,48	76.721.300,00
Kegiatan : Penyediaan Sarana Prasarana Air Limbah Dan Persampahan.	2.958.560.000,00	2.173.086.900,00	73,45	785.473.100,00
Kegiatan : Pembinaan Teknik Pengolahan Air Limbah Dan Persampahan	380.950.000,00	374.240.000,00	98,23	6.710.000,00
Kegiatan : Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	26.525.000,00	6.825.000,00	25,73	19.700.000,00
Kegiatan : PPMU - PAMSIMAS Tingkat Propinsi	134.280.000,00	95.726.200,00	71,28	38.553.800,00
Kegiatan : PPMU - AMPL Tingkat Propinsi	104.400.000,00	75.486.400,00	72,30	28.913.600,00
Kegiatan : PPMU - SANIMAS Tingkat Propinsi	624.560.000,00	592.492.800,00	94,86	32.067.200,00
Kegiatan : Pembangunan Dan Pengembangan Sistem Jaringan Air Minum Wilayah II	1.118.000.000,00	694.175.900,00	62,09	423.824.100,00
Kegiatan : Penataan Infrastruktur Lingkungan Kawasan Strategis	743.500.000,00	524.555.000,00	70,55	218.945.000,00
Kegiatan : Pembangunan Dan Pengembangan Sistem Jaringan Air Minum Wilayah III	346.750.000,00	235.106.300,00	67,80	111.643.700,00
Program : PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	15.702.855.000,00	15.191.512.542,00	96,74	511.342.458,00
Kegiatan : Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan/Wilayah,	1.969.690.000,00	1.709.551.000,00	86,79	260.139.000,00
Kegiatan : Sosialisasi Pedoman Penyusunan Kawasan Strategis Provinsi dan RDTR Kab./Kota	1.667.075.000,00	1.651.150.000,00	99,04	15.925.000,00
Kegiatan : Koordinasi Rencana Tata Ruang Lintas Kab./Kota	592.400.000,00	576.713.300,00	97,35	15.686.700,00
Kegiatan : Sinkronisasi Penyusunan Program Kawasan Strategis	137.900.000,00	135.887.000,00	98,54	2.013.000,00

Provinsi/Nasional	1.540.780.000,00	1.528.550.114,00	99,20	12.229.886,00
Kegiatan : Pembinaan Pemanfaatan Ruang	146.750.000,00	132.443.732,00	90,25	14.306.268,00
Kegiatan : Monitoring/Evaluasi Pemanfaatan Ruang	115.400.000,00	113.690.000,00	98,51	1.710.000,00
Kegiatan : Koordinasi Pengendalian Tata Ruang Lintas Kab./Kota	287.400.000,00	286.464.400,00	99,67	935.600,00
Kegiatan : Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	879.350.000,00	859.180.296,00	97,70	20.169.704,00
Kegiatan : Penyusunan Data dan Informasi Kawasan Strategis Nasional Mamminasata	328.160.000,00	313.753.000,00	95,60	14.407.000,00
Kegiatan : Koordinasi dan Pengendalian Kawasan Strategis Nasional Mamminasata	6.177.400.000,00	6.104.377.000,00	98,81	73.023.000,00
Kegiatan Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Kawasan Strategis Nasional Mamminasata	365.650.000,00	352.301.500,00	96,34	13.348.500,00
Kegiatan Peningkatan Kualitas Aparatur dan Kelembagaan KSN Perkotaan Metropolitan Mamminasata	868.900.000,00	829.766.000,00	95,49	39.134.000,00
Kegiatan : Penatausahaan Administrasi Perkantoran UPTD Mamminasata	325.000.000,00	309.882.000,00	95,34	15.118.000,00
Kegiatan : Pelaksanaan PPMU Air Bersih Mamminasata	301.000.000,00	287.803.200,00	95,61	13.196.800,00
Kegiatan : Pelaksanaan PPMU Persampahan Mamminasata				
Program : PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	15.776.795.000,00	15.413.209.491,00	97,69	363.585.509,00
Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat Wilayah I	5.599.845.000,00	5.470.281.000,00	97,68	129.564.000,00
Kegiatan : Pembangunan Infrastruktur Perumahan Masyarakat Kurang Mampu	121.000.000,00	89.395.000,00	73,88	31.605.000,00
Kegiatan : Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perumahan	227.250.000,00	224.460.000,00	98,77	2.790.000,00
Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan	141.000.000,00	129.770.363,00	92,03	11.229.637,00
Kegiatan : Strategis Penetapan Kebijakan Perumahan dan Permukiman	91.700.000,00	85.100.618,00	92,80	6.599.382,00
Kegiatan : Peningkatan Kualitas Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	766.800.000,00	716.176.910,00	93,39	50.623.090,00
Kegiatan : Penyuluhan dan Pengawasan Kualitas Lingkungan Sehat Perumahan	75.000.000,00	71.630.000,00	95,50	3.370.000,00
Kegiatan : Pelaksanaan PPMU - PPIP Tingkat Provinsi	111.000.000,00	92.978.600,00	83,76	18.021.400,00
Kegiatan : Pelaksanaan PPMU - PPIP Tingkat Provinsi	1.029.100.000,00	1.006.419.000,00	97,79	22.681.000,00
Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat Wilayah II	7.614.100.000,00	7.526.998.000,00	98,85	87.102.000,00
Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat Wilayah III				
Program : PROGRAM PENGEMBANGAN PENATAAN	64.770.170.000,00	52.397.534.076,00	80,89	12.372.635.924,00

BANGUNAN dan LINGKUNGAN GEDUNG				
Kegiatan : Pembinaan dan Peningkatan Kinerja Aparatur Pengembangan Sumber Daya Lokal	576.000.000,00	553.442.453,00	96,08	22.557.547,00
Kegiatan : Penyusunan Harga Satuan dan Pemetaan Bahan Bangunan Lokal	554.000.000,00	501.160.615,00	90,46	52.839.385,00
Kegiatan : Penguatan Sistem Pengujian Bahan Bangunan Lokal	384.200.000,00	366.026.800,00	95,26	18.173.200,00
Kegiatan : Pengelolaan Pusat Informasi Pengembangan Permukiman dan Bangunan (PIP2B)	964.220.000,00	939.855.710,00	97,47	24.364.290,00
Kegiatan : Pembangunan dan Peningkatan Bangunan dan Lingkungan Gedung	2.683.750.000,00	2.500.498.400,00	93,17	183.251.600,00
Kegiatan : Pembinaan Teknis Bangunan Gedung	617.500.000,00	493.742.178,00	79,95	123.757.822,00
Kegiatan : Pengembangan Nilai dan Geografi Sejarah	6.957.250.000,00	5.686.612.280,00	81,73	1.270.637.720,00
Kegiatan : Pembangunan Gedung Wisma Negara	52.033.250.000,00	41.356.195.640,00	79,48	10.677.054.360,00
JUMLAH	135.284.238.497,75	119.225.950.226,00	88,12	16.058.288.271,75
Penerimaan SP2D		121.260.992.724,00		
Pengeluaran SPJ (LS + UP/GU/TU)		119.225.950.226,00		
PENGEMBALIAN SISA TU		1.643.363.646,00		
PENGEMBALIAN SISA KAS		338.205.052,00		
Saldo Kas				

Makassar, 31 Desember 2016

Bendahara Pengeluaran

Hj. I SIDA, SE
NIP. 19631231 199303 2 047

**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PER BAGIAN**

S K P D : Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Dan Pertanahan
Pengguna Anggaran : Ir. H. ANDI BAKTI HARUNI, CES
Bendahara Pengeluaran : Hj. I SIDA, SE
Bagian :
Tahun Anggaran : 2017
Bulan : Desember

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	%	Sisa Pagu Anggaran
1	2	3	4	5=2-3
BELANJA DAERAH	98.324.068.750,54	94.084.350.941,00	95,68	4.239.717.809,53
Gaji dan Tunjangan	11.631.427.340,00	10.731.810.698,00	92,26	899.616.642,00
Gaji Pokok/Uang Representasi 1)	9.459.724.675,00	8.626.400.400,00	91,19	833.324.275,00
Tunjangan Keluarga	771.460.865,00	755.085.424,00	97,87	16.375.441,00
Tunjangan Jabatan 2)	375.259.500,00	349.020.000,00	93,00	26.239.500,00
Tunjangan Fungsional	-	-	-	-
Tunjangan Fungsional Umum	327.797.750,00	322.335.000,00	98,33	5.462.750,00
Tunjangan Beras 1)	436.569.486,00	428.074.620,00	98,05	8.494.866,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	19.586.403,00	14.651.278,00	74,80	4.935.125,00
Pembulatan Gaji	114.669,00	110.310,00	96,19	4.359,00
Iuran Asuransi Kesehatan	206.929.432,00	202.784.026,00	97,99	4.145.406,00
Iuran Asuransi Kecelakaan Kerja/Kematian	33.984.560,00	33.349.640,00	98,13	634.920,00
Tambahan Penghasilan PNS	4.332.836.141,54	3.495.630.783,00	80,67	837.205.358,54
Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	4.332.836.141,54	3.495.630.783,00	80,67	837.205.358,54
Program : PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	6.824.404.000,00	6.549.803.944,00	95,97	274.600.056,00
Kegiatan : Penatausahaan administrasi dan pemeliharaan prasarana – sarana perkantoran	4.682.349.000,00	4.493.090.219,00	95,95	189.258.781,00
Kegiatan : Penatausahaan pelayanan Kehumasan SKPD	336.660.000,00	333.832.840,00	99,16	2.827.160,00
Kegiatan : Penatausahaan Unit Layanan Pengadaan SKPD	634.685.000,00	622.708.140,00	98,11	11.976.860,00
Kegiatan : Penatalaksanaan KORPRI SKPD	20.000.000,00	19.985.000,00	99,92	15.000,00
Kegiatan : Penatausahaan simpul koordinasi dan konsultasi SKPD	1.150.710.000,00	1.080.187.745,00	93,87	70.522.255,00

Program : PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS DAN KINERJA SKPD	2.575.400.000,00	2.542.186.000,00	98,71	33.214.000,00
Kegiatan : Penatausahaan Administrasi Keuangan	925.120.000,00	909.894.000,00	98,35	15.226.000,00
Kegiatan : Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD	93.320.000,00	92.160.000,00	98,75	1.160.000,00
Kegiatan : Penatausahaan administrasi kepegawaian	1.413.960.000,00	1.397.132.000,00	98,80	16.828.000,00
Kegiatan : Penatausahaan administrasi asset daerah SKPD	143.000.000,00	143.000.000,00	100,00	-
Program PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PERENCANAAN DAN SISTEM EVALUASI KINERJA SKPD	2.811.360.289,00	2.747.841.529,00	97,74	63.518.760,00
Kegiatan : Penyusunan Program - Kegiatan dan RKA - DPA SKPD	794.165.289,00	752.141.800,00	94,70	42.023.489,00
Kegiatan : Monitoring, evaluasi dan pelaporan Akuntabilitas Kinerja SKPD	421.660.000,00	414.504.850,00	98,30	7.155.150,00
Kegiatan : Penyusunan data dan informasi SKPD	1.372.285.000,00	1.362.756.779,00	99,30	9.528.221,00
Kegiatan : Partisipasi Keikutsertaan Pameran-Pameran	223.250.000,00	218.438.100,00	97,84	4.811.900,00
Program : FASILITASI DAN PEMBINAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	7.512.334.000,00	6.549.955.623,00	87,18	962.378.377,00
Kegiatan : Pembuatan Prototype Rumah Untuk Korban Bencana	570.120.000,00	485.063.926,00	85,08	85.056.074,00
Kegiatan : Penyediaan Rumah Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah	534.420.000,00	521.645.777,00	97,60	12.774.223,00
Kegiatan : Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelestarian Lingkungan Perumahan	494.630.000,00	491.500.500,00	99,36	3.129.500,00
Kegiatan : Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perumahan	208.850.000,00	207.500.000,00	99,35	1.350.000,00
Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Penyediaan Perumahan	199.300.000,00	153.411.111,00	76,97	45.888.889,00
Kegiatan : Penyuluhan dan Pengawasan Kualitas Lingkungan Sehat Perumahan	396.100.000,00	394.604.500,00	99,62	1.495.500,00
Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Tugas Kelompok Kerja Perumahan	178.000.000,00	168.515.594,00	94,67	9.484.406,00
Kegiatan : Simpul Koordinasi Pembiayaan Perumahan	458.800.000,00	410.760.000,00	89,52	48.040.000,00
Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pembiayaan Perumahan	241.800.000,00	237.302.933,00	98,14	4.497.067,00
Kegiatan : Penatausahaan Rumah Negara	300.300.000,00	238.443.722,00	79,40	61.856.278,00
Kegiatan : Sosialisasi Pengelolaan Rumah Negara	235.000.000,00	202.747.600,00	86,27	32.252.400,00
Kegiatan : Pengelolaan Pusat Informasi Pengembangan Perumahan	711.120.000,00	708.873.199,00	99,68	2.246.801,00
Kegiatan : Pembinaan Teknis Perumahan	475.781.000,00	322.400.800,00	67,76	153.380.200,00
Kegiatan : Sertifikasi Tenaga Ahli Perumahan	463.931.000,00	125.492.600,00	27,04	338.438.400,00
Kegiatan : Penyusunan Standar dan Spesifikasi Bahan Bangunan Lokal	276.131.000,00	246.853.800,00	89,39	29.277.200,00
Kegiatan : Penyusunan Sistem Informasi Perumahan	235.931.000,00	194.471.911,00	82,42	41.459.089,00
Kegiatan : Pengelolaan Rumah Susun	825.000.000,00	813.532.000,00	98,60	11.468.000,00
Kegiatan : Pengelolaan Sumber Daya Lokal	707.120.000,00	626.835.650,00	88,64	80.284.350,00
Program : FASILITASI DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR				

PERMUKIMAN	59.653.526.980,00	58.545.412.782,00	98,14	1.108.114.198,00
Kegiatan : Penyediaan Sarana Prasarana Drainase dan Air Limbah				
Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Persampahan	6.083.707.000,00	5.798.505.000,00	95,31	285.202.000,00
Kegiatan : Revitalisasi Kawasan Permukiman	5.137.115.000,00	5.046.488.000,00	98,23	90.627.000,00
Kegiatan : Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah dan Persampahan	1.644.575.000,00	1.643.975.000,00	99,96	600.000,00
Kegiatan : PPMU-PAMSIMAS Tingkat Propinsi	2.561.160.000,00	2.553.886.000,00	99,71	7.274.000,00
Kegiatan : PPMU-AMPL Tingkat Propinsi	87.100.000,00	78.488.500,00	90,11	8.611.500,00
Kegiatan : PPMU-SANIMAS Tingkat Propinsi	87.100.000,00	83.360.040,00	95,70	3.739.960,00
Kegiatan : Pembangunan dan Pengembangan Sistem Jaringan Air Minum	87.100.000,00	85.477.502,00	98,13	1.622.498,00
Kegiatan : Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman	4.429.240.000,00	4.333.619.310,00	97,84	95.620.690,00
Kegiatan : Pembangunan Fasilitas Umum	1.997.469.000,00	1.990.159.400,00	99,63	7.309.600,00
Kegiatan : Pembangunan Fasilitas Sosial	18.490.342.120,00	18.351.350.470,00	99,24	138.991.650,00
Kegiatan : Pembinaan Pengembangan Kawasan Permukiman	10.814.858.860,00	10.795.245.060,00	99,81	19.613.800,00
Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Kawasan Permukiman	531.660.000,00	520.877.000,00	97,97	10.783.000,00
Kegiatan : Pengelolaan Taman	745.500.000,00	700.734.500,00	93,99	44.765.500,00
	6.956.600.000,00	6.563.247.000,00	94,34	393.353.000,00
Program PROGRAM PENATAAN KEAGRARIAAN DAN PENATAAN ADMINISTRASI PERBATASAN ANTAR DAERAH,PROVINSI	2.982.780.000,00	2.921.709.582,00	97,95	61.070.418,00
Kegiatan : Pengendalian dan Pemanfaatan Tanah				
Kegiatan : Koordinasi Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum	532.420.000,00	480.578.780,00	90,26	51.841.220,00
Kegiatan : Sosialisasi Pengadaan Tanah	480.740.000,00	478.153.000,00	99,46	2.587.000,00
Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah	800.000.000,00	799.630.000,00	99,95	370.000,00
Kegiatan : Koordinasi Penyelesaian Konflik Pertanahan	228.260.000,00	225.202.197,00	98,66	3.057.803,00
Kegiatan : Penatausahaan dan Fasilitasi Perijinan Pertanahan	335.620.000,00	332.545.350,00	99,08	3.074.650,00
Kegiatan : Sosialisasi Penguasaan Tanah Ulayat	405.740.000,00	405.650.255,00	99,97	89.745,00
	200.000.000,00	199.950.000,00	99,97	50.000,00
JUMLAH	98.324.068.750,54	94.084.350.941,00	95,68	4.239.717.809,53
Penerimaan SP2D		95.564.266.034,00		
Pengeluaran SPJ (LS + UP/GU/TU)		94.084.350.941,00		
PENGEMBALIAN SISA TU		1.151.436.916,00		
PENGEMBALIAN SISA KAS		328.478.177,00		
Saldo Kas		-		

Makassar 29 Desember 2017

Bendahara Pengeluaran

Hj. I SIDA, SE

**NIP. 19631231 199303 2
047**



BIOGRAFI PENULIS



Heriadi nama panggilan heri lahir di gattareng 08 maret 1998 dari pasangan suami istri, bapak jumasse dan ibu hasnawiyah. Peneliti adalah anak pertama dari dua bersaudara. Peneliti sekarang bertempat tinggal dikarunrung kecamatan rappocini kota Makassar.

Pendidikan yang telah di tempuh oleh peneliti yaitu SDN 20 Gattareng lulusan 2009, SMPN 3 Pujananting lulusan tahun 2012, lulusan SMKN 1 Lau Maros tahun 2015, dan mulai tahun 2015 mengikuti program S1 manajemen Universitas Muhammadiyah Makassar sampai dengan sekarang. sampai dengan penulisan skripsi ini peneliti masih terdaftar sebagai mahasiswa program S1 manajemen universitas muhammadiyah Makassar.